

# PEREKONOMIAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA 2016



Kerja Sama  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**  
dengan  
**BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KUBU RAYA**  
Tahun Anggaran 2017



**PEREKONOMIAN DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA**

*Regional Economy  
of Kubu Raya Regency*

**2016**

**PEREKONOMIAN DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA  
2016**

*Regional Economy  
of Kubu Raya Regency  
2016*

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman : ix + 60 halaman

**Boleh Dikutip dengan Menyebutkan Sumbernya**

*May be cited with reference to the source*



## PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

### BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jalan Arteri Supadio Km 17,8 Telp (0561) 722744, Fax (0561) 723443 Sungai Raya

---

## KATA SAMBUTAN

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya maka Publikasi “Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2016” yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya dapat terwujud tepat pada waktunya.

Dengan terbitnya publikasi ini tentunya akan dapat menambah informasi tentang indikator makro ekonomi di Kabupaten Kubu Raya, khususnya yang berkaitan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, Inflasi atas dasar harga produsen, PDRB per kapita, Lapangan Usaha yang dominan dan indikator-indikator lainnya. Di samping itu juga diperkaya dengan Indikator makro ekonomi kabupaten/kota lainnya se Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian kita dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh sekaligus membuat perencanaan yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada tim penyusunan publikasi ini saya ucapkan terima kasih dan diharapkan dapat selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas data yang ditampilkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan masyarakat umum secara luas.

Sungai Raya, Agustus 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kubu Raya  
Kepala,

**Yusran Anizam, S.Sos., M.Si.**

NIP. 19690603 198903 1 005

## **KATA PENGANTAR**

Penyusunan Publikasi Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kubu Raya. Gambaran perekonomian daerah menggunakan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kubu Raya dan Angka PDRB kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam publikasi ini dilengkapi dengan beberapa konsep, definisi dan tatacara penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan tujuan untuk menghindari kesalahan persepsi bagi para pengguna data. Indikator-indikator makro ekonomi yang disajikan mengacu pada kontinuitas, konsistensi dan keterbandingan data secara berkala baik untuk wilayah administrasi Kabupaten Kubu Raya maupun antarwilayah administrasi kabupaten/kota lainnya.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi hingga selesainya publikasi ini. Kepada para konsumen data diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan kritik demi penyempurnaan publikasi yang akan datang.

Sungai Raya, Agustus 2017

Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Kubu Raya  
Kepala,

**Ir. ANTON MANURUNG, MM**

NIP. 19630828 198802 1 001

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	2
1.3. Ruang Lingkup	2
1.4. Metodologi dan Cakupan Indikator	3
1.5. Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II     PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH</b>	
2.1. Perkembangan Perekonomian Menurut Kategori	7
2.2. Perkembangan Perekonomian Menurut Penggunaan	21
<b>BAB III    KETENAGAKERJAAN, INVESTASI, DAN KEUANGAN DAERAH</b>	
3.1. Ketenagakerjaan	26
3.2. Investasi	32
3.3. Keuangan Daerah	38
<b>BAB IV    PERBANDINGAN ANTAR WILAYAH</b>	
4.1. Kontribusi Perekonomian Kabupaten/Kota terhadap Kalimantan Barat	43
4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota	45
4.3. Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota	47
4.4. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota	50
4.5. Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan	53
4.6. Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran	56

<b>BAB V</b>	<b>DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI MAKRO</b>	
	5.1. Kebutuhan Investasi	59
	5.2. Sektor Potensi	60
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	
	Kesimpulan	63
	DAFTAR PUSTAKA	66

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel	2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2016 (Persen)	8
Tabel	2.2.	Distribusi PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Persen)	16
Tabel	2.3	Indeks Implisit dan Laju Inflasi Atas Dasar Harga Produsen Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016	19
Tabel	2.4	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016 (Persen)	20
Tabel	2.5	PDRB Kabupaten Kubu Raya Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2012-2016 (Milyar Rp)	22
Tabel	3.1	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016	27
Tabel	3.2	Tingkat Produktivitas Relatif (TPR) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016	30
Tabel	3.3	Koefisien ILOR Menurut Kategori di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2016	31
Tabel	3.4	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 (Juta Rp)	40
Tabel	3.5	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	41
Tabel	3.6	Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016	41
Tabel	4.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (Persen)	45
Tabel	4.2	Tiga Kategori Ekonomi yang Memberi Kontribusi Tertinggi pada Perekonomian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2016	47
Tabel	4.3	Nilai PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Ribu rupiah)	51
Tabel	4.4	Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2016	54
Tabel	4.5	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2016	56
Tabel	5.1	Kontribusi Kategori Ekonomi di Kabupaten Kubu Raya dan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Persen)	61



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar	2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2016 (Persen)	7
Gambar	2.2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2016	10
Gambar	2.3	Pertumbuhan Subkategori pada Industri Pengolahan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 (Persen)	11
Gambar	2.4	Pertumbuhan Subkategori pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 (Persen)	12
Gambar	2.5	Perkembangan Struktur Perekonomian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007-2016 (Persen)	13
Gambar	2.6	Nilai PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2010, 2010 – 2016 (Triliun Rupiah)	15
Gambar	2.7	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalbar Tahun 2012-2016 (Juta rupiah)	18
Gambar	2.8	Struktur PDRB Kabupaten Kubu Raya Menurut Penggunaan Tahun 2016	21
Gambar	2.9	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2012-2016 (Persen)	24
Gambar	2.10	Pertumbuhan Komponen Konsumsi Rumah tangga, 2011-2016 (Persen)	24
Gambar	2.11	Pertumbuhan Komponen Konsumsi LNPR, 2011-2016 (Persen)	25
Gambar	2.12	Pertumbuhan Komponen Konsumsi Pemerintah, 2011-2016 (Persen)	25
Gambar	2.13	Pertumbuhan Komponen PMTB, 2011-2016 (Persen)	25
Gambar	3.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2016	28
Gambar	3.2	Koefisien ILOR Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2016	31
Gambar	3.3	Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2016 (Juta Rp)	33
Gambar	3.4	Persentase Nilai Investasi PMDN Kabupaten Kubu Raya Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016	33
Gambar	3.5	Perkembangan Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja Proyek PMDN Kabupaten Kubu Raya, 2010-2016 (Orang)	34
Gambar	3.6	Perkembangan Nilai Investasi PMA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2016 (Juta Rp)	35
Gambar	3.7	Persentase Nilai Investasi PMA Kabupaten Kubu Raya Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016	35

Gambar	3.8	Perkembangan Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja Proyek PMA Kabupaten Kubu Raya, 2010-2016 (Orang)	36
Gambar	3.9	Koefisien ICOR Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2016	37
Gambar	3.10	Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan PDRB ADHB Tahun 2012-2016 (Juta Rp)	38
Gambar	3.11	Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 dan 2016	39
Gambar	3.12	Persentase Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016	42
Gambar	4.1	PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Milyar Rp)	43
Gambar	4.2	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2016 (Persen)	44
Gambar	4.3	Sumber Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota Tahun 2016 (Persen)	46
Gambar	4.4	Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (persen)	50
Gambar	4.5	Posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Tahun 2016	52
Gambar	4.6	Posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Penduduk Miskin Tahun 2016	55
Gambar	4.7	Posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016	57



**BAB 1**  
**PENDAHULUAN**

# Bab 1

## PENDAHULUAN

*Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, metodologi dan cakupan indikator, serta sistematika penulisan Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya 2016*

### 1.1. Latar Belakang

**P**embangunan ekonomi merupakan serangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier untuk mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat. Dengan kata lain arah pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan tingkat pemerataan yang semakin membaik.

Perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah tentunya sangat memerlukan suatu ukuran kuantitas berupa indikator-indikator makro ekonomi yang dapat memberikan gambaran umum tentang keadaan ekonomi masyarakat baik pada masa lalu maupun masa kini sebagai dasar penentu arah dan strategi kebijakan pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Penyajian statistik perekonomian daerah secara berkala mutlak diperlukan sebagai bahan perencanaan pembangunan regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan regional dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk menentukan arah pembangunan ekonominya. Hal ini memerlukan berbagai pertimbangan yang matang dengan memperhatikan potensi, kendala, dan kebutuhan masyarakat. Untuk melihat gambaran yang menyeluruh tentang

daerah dibutuhkan penyediaan data/informasi yang akurat dan terkini. Berdasarkan pendekatan ekonomi makro, data atau indikator hasil pembangunan tersebut antara lain tergambar dari: pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju inflasi, dan data atau indikator lainnya. Mencermati pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya melakukan kegiatan penyusunan Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran terhadap hasil pembangunan ekonomi makro di Kabupaten Kubu Raya
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan kebijakan serta hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai, khususnya di bidang ekonomi
3. Mengidentifikasi beberapa peluang dan kendala terhadap kondisi ekonomi yang terjadi
4. Membantu pemerintah daerah dalam menyusun arah dan kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Kubu Raya
5. Bahan pendukung terhadap penelitian yang lebih spesifik, misalnya sektor ekonomi yang memberi daya dukung terhadap perekonomian
6. Bahan masukan bagi penetapan skala prioritas pembangunan berbasis pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data ekonomi makro dari hasil survei lapangan serta data primer dari dinas/instansi di Kabupaten Kubu Raya terutama BPS dan Bappeda.
2. Melakukan studi literatur yang terkait dengan indikator ekonomi makro.
3. Melakukan penghitungan indikator dan pengelompokkan indikator yang sejenis untuk mempermudah penulisan analisis kerangka makro ekonomi daerah.

4. Perumusan saran untuk perbaikan pelaksanaan kebijakan pembangunan tahun berikutnya

#### 1.4. Metodologi dan Cakupan Indikator

Metodologi penyusunan Perekonomian Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 dilakukan dengan mengaplikasikan formula ekonomi dan statistik yang juga dilengkapi dengan studi referensi. Tahapan untuk menghasilkan indikator dilakukan sebagai berikut:

1. Kompilasi data sekunder dan survei lapangan  
Tahapan ini merupakan tahap awal dengan melakukan kegiatan identifikasi jenis data serta melakukan survei dan pengumpulan data di Kabupaten Kubu Raya yang akan digunakan sebagai bahan perhitungan dan analisis. Selain data dari hasil survei juga dari dinas/instansi terkait, seperti: Badan Pusat Statistik (BPS), instansi pemerintah daerah, serta juga dari beberapa lembaga yang bergerak di bidang ekonomi
2. Tahapan pengolahan data  
Pada tahap ini data yang diperoleh dari hasil survei dan inventarisasi data selanjutnya diproses dan diolah. Hasil olahan tersebut dihimpun dan dihitung sehingga dihasilkan indikator-indikator pembangunan ekonomi Kabupaten Kubu Raya
3. Tahapan analisis  
Pada tahap ini data-data yang telah diproses dan diolah dengan baik selanjutnya dilakukan analisis terhadap indikator yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, indikator-indikator yang disajikan dalam penulisan (cakupan indikator) sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan ekonomi masyarakat, diantaranya :
  - a. Indikator Pertumbuhan dan Struktur perekonomian (menurut kategori lapangan usaha dan menurut penggunaan), PDRB per kapita, Inflasi (Atas Dasar Harga harga produsen), dan Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi.
  - b. Indikator Ketenagakerjaan (termasuk pengangguran), Tingkat Produktivitas Relatif (TPR), dan *Incremental Labour Output Rasio* (ILOR)  
Indikator ketenagakerjaan bermanfaat untuk melihat kategori yang banyak menyerap tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja dibandingkan dengan distribusi

perekonomian berdasarkan kategori menghasilkan indikator tingkat produktivitas relatif. Sementara koefisien ILOR menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap menurut laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Indikator tingkat pengangguran terbuka antara lain bermanfaat untuk melihat persentase penduduk usia kerja yang masih belum mendapat pekerjaan. Jika indikator tersebut dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka akan terlihat peranan pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran atau sebaliknya. Jika kondisi tersebut terjadi, maka pertumbuhan ekonomi cenderung mengarah pada sektor-sektor tertentu yang padat modal.

- c. Indikator ekonomi terkait dengan tenaga kerja, seperti: ICOR dan Investasi.

*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) merupakan suatu besaran yang menunjukkan tambahan unit modal yang diperlukan untuk menaikkan satu unit output. Dengan ICOR dapat diketahui tingkat efisiensi penggunaan modal terhadap output yang dihasilkan masyarakat. Sementara itu, perkembangan investasi dari proyek PMDN dan PMA antara lain bermanfaat untuk melihat kinerja investasi di kabupaten berdasarkan kategori.

- d. Indikator keuangan daerah

Data atau indikator keuangan daerah yang menarik untuk dikaji antara lain: kontribusi keuangan daerah terhadap PDRB serta perkembangan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi pengeluarannya.

- e. Indikator Potensi Wilayah seperti LQ.

Indikator LQ bermanfaat untuk melihat kategori-kategori yang memiliki keunggulan pada suatu wilayah

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Ruang Lingkup
- 1.4. Metodologi dan Cakupan Indikator
- 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB 2. PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH**

- 2.1. Perkembangan Perekonomian Menurut Kategori
- 2.2. Perkembangan Perekonomian Menurut Penggunaan

### **BAB 3. KETENAGAKERJAAN, INVESTASI, DAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1. Ketenagakerjaan
- 3.2. Investasi
- 3.3. Keuangan Daerah

### **BAB 4. KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT**

- 4.1. Kontribusi Perekonomian Kabupaten/Kota terhadap Kalimantan Barat
- 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
- 4.3. Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota
- 4.4. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota
- 4.5. Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan
- 4.6. Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

### **BAB 5. DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI MAKRO**

- 5.1. Kebutuhan Investasi
- 5.2. Sektor Potensi

### **BAB 6. PENUTUP**

- 6.1. Kesimpulan



# **BAB 2**

## **PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH**



# Bab 2

## PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

*Bab ini berisi tentang kondisi pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, dan perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Kubu Raya*

**S**epuluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 17 Juli 2017 di Provinsi Kalimantan Barat terbentuk Kabupaten Kubu Raya yang merupakan kabupaten ke-14 diantara kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sebagaimana kabupaten baru yang masih berusia sepuluh tahun, Kabupaten Kubu Raya masih harus berbenah dalam mengatur segala sendi pemerintahan, seperti sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam aspek ekonomi, perkembangan perekonomian di Kabupaten Kubu Raya tidak terlepas dari kondisi faktor internal dan eksternal baik pada level regional, nasional, maupun internasional.

Berdasarkan komponen penyusun PDRB di Kabupaten Kubu Raya dari lapangan usaha, karakteristik ekonomi Kabupaten Kubu Raya masih didominasi dari kategori industri pengolahan. Sementara berdasarkan komponen penyusun PDRB dari sisi penggunaan, permintaan domestik masih mendominasi. Hal ini tercermin dari tingginya kontribusi kategori Industri Pengolahan yang mencapai 32 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kubu Raya dibandingkan dengan kategori lain. Sementara dari sisi permintaan, kontribusi terbesar berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 53,5 persen terhadap total PDRB.

Untuk meningkatkan kondisi perekonomian Kabupaten Kubu Raya, perlu memperhatikan potensi dan peluang yang dimiliki. Hal ini tentu saja membutuhkan dukungan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong aktivitas perekonomian secara optimal yang dapat memberi manfaat untuk seluruh masyarakat.

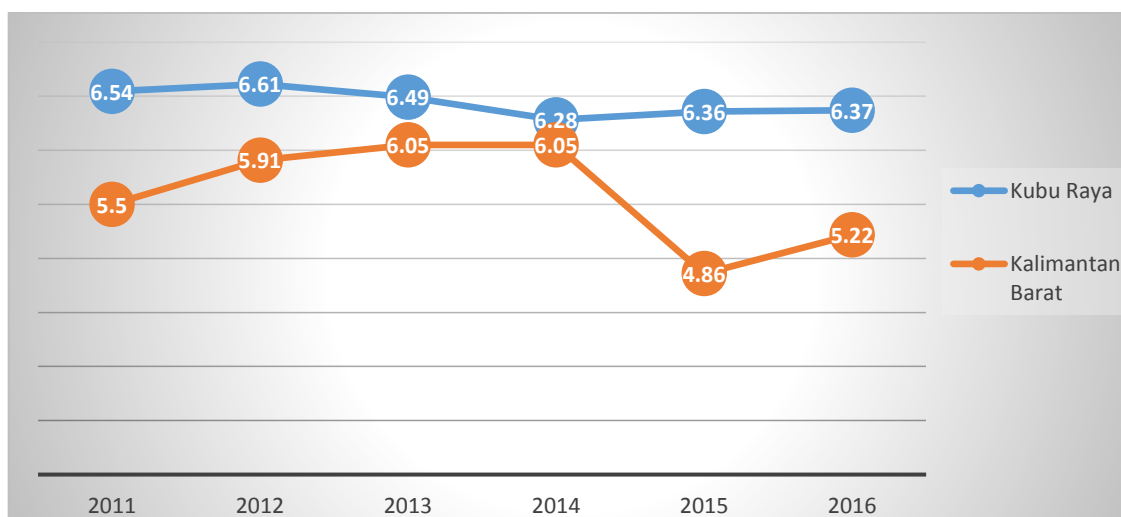
## 2.1. Perkembangan Perekonomian Menurut Kategori

### 2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 merupakan yang ke sembilan kalinya sejak kabupaten ini terbentuk. Walaupun penghitungan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya baru dilakukan sembilan kali, namun penghitungan tetap dilakukan menggunakan tahun dasar 2010. Hal ini sesuai dengan penerapan standar metode yang terbaru. Pergerakan pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010.

Berdasarkan Gambar 2.1, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 mencapai sebesar 6,37 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 6,36 persen. Secara persentase, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selama tiga tahun terakhir sebesar 6,34 persen, sedikit mengalami perlambatan jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selama enam tahun terakhir, yaitu sebesar 6,44 persen.

**Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2016 (Persen)**



Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 5,22 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,86 persen. Pada tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya juga mengalami peningkatan namun tidak sebesar pencapaian

pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yang relatif lebih tinggi dari kondisi tahun 2015.

Berdasarkan Tabel 2.1, pada tahun 2016 pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut dialami oleh kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 32,29 persen, kategori informasi dan komunikasi sebesar 11,02 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 10,55 persen, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial sebesar 9,71 persen, kategori konstruksi sebesar 9,48 persen, kategori jasa pendidikan sebesar 6,76 persen, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,41 persen, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,29 persen, kategori pertambangan dan penggalan sebesar 5,72 persen, kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,46 persen, kategori industri pengolahan sebesar 5,12 persen, kategori real estate sebesar 4,27 persen, kategori jasa lainnya sebesar 4,25 persen, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,69 persen, serta yang terakhir kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 2,2 persen.

**Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2016 (Persen)**

	<b>Kategori</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,33	2,82	7,52	-0,05	1,59	3,69
2	Pertambangan dan Penggalan	0,80	-0,83	1,62	1,60	2,57	5,72
3	Industri Pengolahan	6,73	5,33	4,24	6,74	6,76	5,12
4	Pengadaan Listrik, Gas	6,92	5,67	17,39	39,91	7,13	32,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,99	0,57	0,81	3,35	5,02	6,41
6	Konstruksi	12,04	16,43	13,75	12,73	9,18	9,48
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,13	7,36	6,72	7,40	7,42	5,46
8	Transportasi dan Pergudangan	8,53	6,97	5,52	6,42	6,84	10,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,73	8,45	5,60	5,07	4,82	6,29
10	Informasi dan Komunikasi	15,66	16,64	10,82	10,84	11,83	11,02
11	Jasa Keuangan	5,47	11,93	7,68	5,52	7,14	8,04
12	Real Estate	12,62	8,11	5,01	6,82	5,54	4,27
13	Jasa Perusahaan	6,24	2,71	9,12	7,57	7,58	8,11

Kategori		2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,85	7,09	6,53	6,74	8,98	9,71
15	Jasa Pendidikan	9,09	9,49	8,17	9,84	8,69	6,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,13	2,04	4,29	4,40	4,50	2,20
17	Jasa Lainnya	3,16	0,18	1,77	6,42	5,91	4,25
	PDRB	6,54	6,61	6,49	6,28	6,36	6,37

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

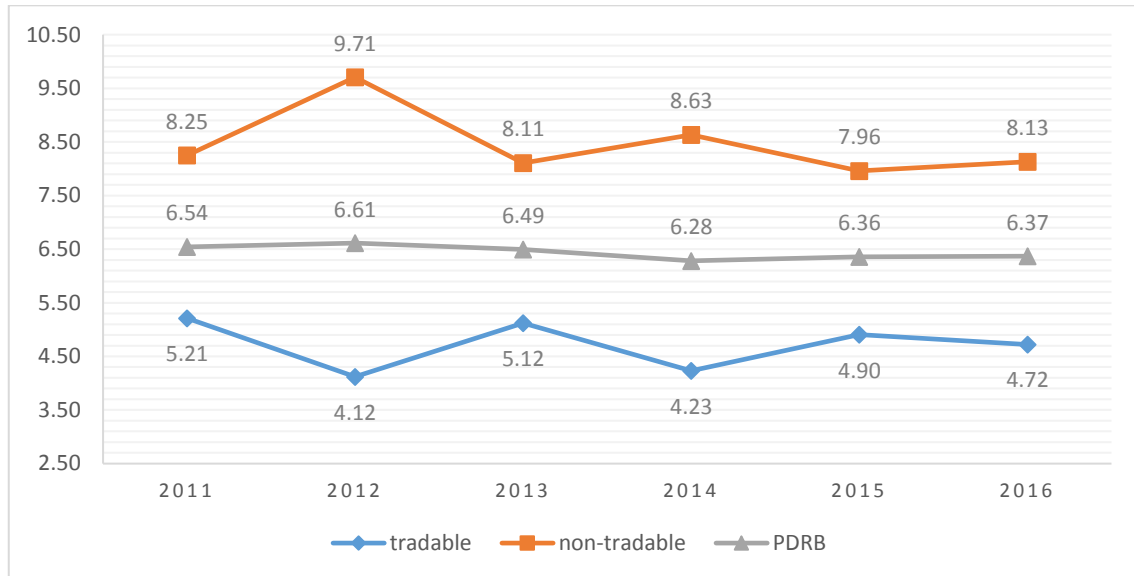
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan yang tetap tinggi pada kategori *non-tradable* seperti kategori pengadaan listrik dan gas, kategori informasi dan komunikasi, serta kategori transportasi dan pergudangan. Kategori *non-tradable* adalah kategori yang tidak dapat menghasilkan devisa karena pada umumnya tidak langsung menghadapi persaingan dengan luar negeri (*non-traded*). Listrik, misalnya, tidak memiliki pesaing luar negeri di pasar domestik. Demikian juga pelayaran dalam negeri, bandara, pelabuhan, air bersih, akomodasi, maupun jasa-jasa. Jika pihak asing hendak masuk ke kategori tersebut mereka harus mendirikan perusahaan di Indonesia. Berbeda dengan sektor *tradable* yang harus menghadapi persaingan langsung di pasar dalam negeri dengan barang-barang impor maupun di pasar luar negeri dengan barang-barang dari seluruh dunia.

Selama ini, kategori *non-tradable* di Indonesia adalah kategori yang paling banyak menyerap dana. Akibat dari penyerapan dana yang besar tersebut, kategori *non-tradable* memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan kategori *tradable*. Berdasarkan Gambar 2.2, terlihat bahwa pertumbuhan pada kategori *non-tradable* selalu lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada kategori *tradable* selama enam tahun terakhir. Pertumbuhan kategori *non-tradable* yang semakin jauh meninggalkan kategori *tradable* akan berdampak pada penurunan relatif kapasitas perekonomian dalam mengekspor, sehingga berdampak ke transaksi perdagangan di neraca pembayaran.

Selain itu, kondisi tersebut dapat membahayakan bagi perekonomian suatu daerah. Masyarakat dan pelaku ekonomi lainnya cenderung akan berada pada *comfort zone* ketika melihat data-data statistik mengenai pertumbuhan ekonomi yang tumbuh, namun sebenarnya hal tersebut dapat menjadi sebuah ilusi karena perekonomian yang berkembang tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang seharusnya dinikmati.

Keadaan tersebut dapat menyebabkan menurunnya lapangan kerja sehingga angka pengangguran menjadi tinggi dan akan menurunkan kesejahteraan pada jangka panjang.

**Gambar 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2016 (Persen)**

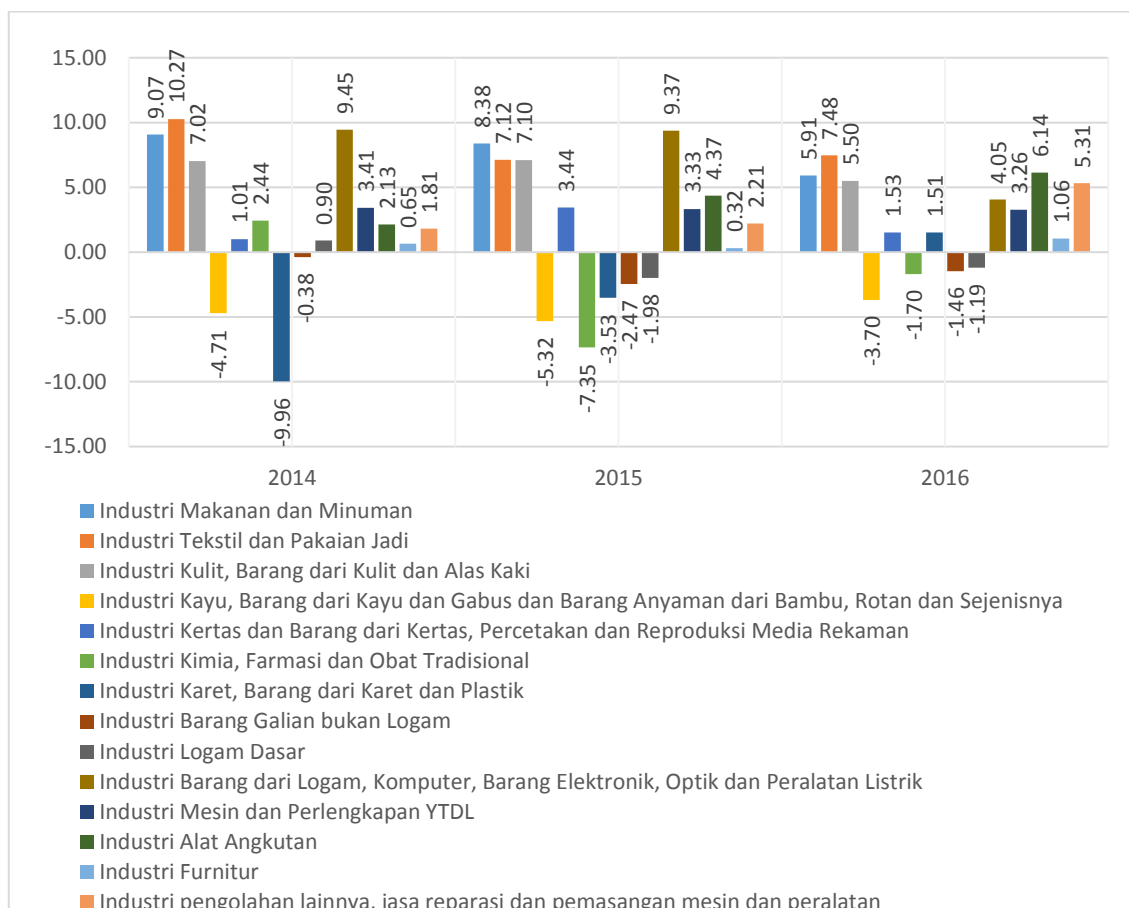


Pertumbuhan ekonomi yang cenderung bertumpu pada kategori *non-tradable* dinilai memberikan *multiplier effect* (efek berantai) yang kecil bagi masyarakat. Meskipun demikian, kategori industri pengolahan dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi terbesar bagi perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Kategori industri pengolahan secara total tumbuh sebesar 5,12 persen pada tahun 2016. Kondisi ini mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,76 persen pada tahun 2015.

Berdasarkan Gambar 2.3, terlihat bahwa pertumbuhan kategori industri pengolahan terbesar berada pada subkategori industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 7,48 persen, selanjutnya subkategori industri alat angkutan sebesar 6,14 persen, industri makanan dan minuman sebesar 5,91 persen, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 5,5 persen, industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan sebesar 5,31 persen, industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar 4,05 persen, industri mesin dan perlengkapan YTDL sebesar 3,26 persen, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 1,53 persen, industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 1,51 persen, serta industri furnitur sebesar 1,06 persen. Di sisi lain, terdapat empat subkategori yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu industri logam dasar sebesar -

1,19 persen, industri barang galian bukan logam sebesar -1,46 persen, industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar -1,7 persen, serta industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya sebesar -3,7 persen.

**Gambar 2.3. Pertumbuhan Subkategori pada Industri Pengolahan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 (Persen)**

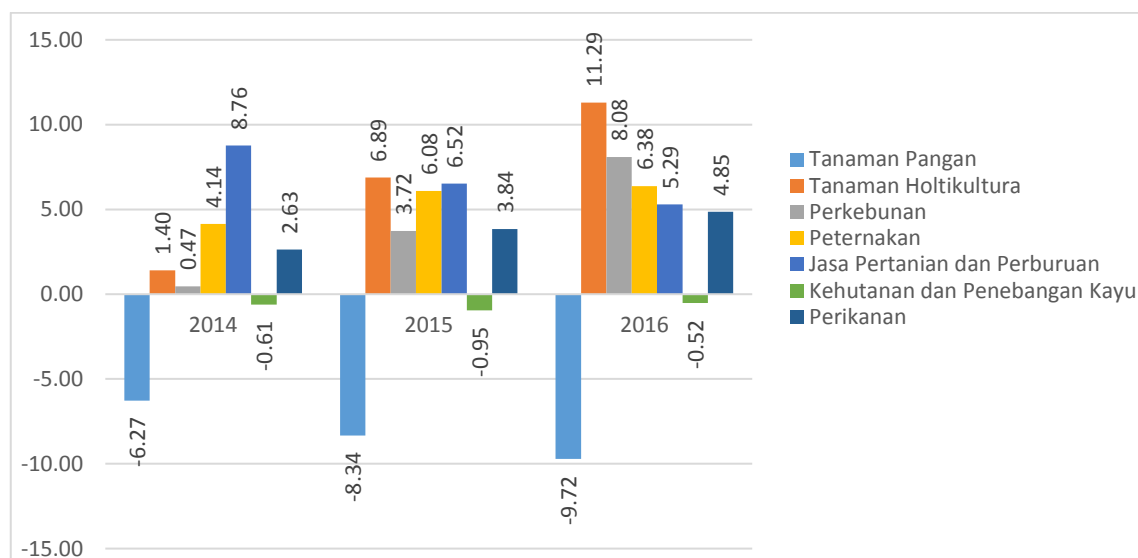


Setelah kategori industri pengolahan, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi terbesar kedua terhadap seluruh total perekonomian. Secara umum kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 3,69 persen pada tahun 2016. Kondisi ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tumbuh sebesar 1,59 persen di tahun 2015.

Berdasarkan Gambar 2.4, pada tahun 2016 terlihat bahwa pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terbesar berada pada subkategori tanaman hortikultura yaitu sebesar 11,29 persen. Sementara itu, subkategori perkebunan tumbuh sebesar 8,08 persen, peternakan tumbuh sebesar 6,38 persen, jasa pertanian dan perburuan sebesar 5,29 persen serta perikanan sebesar 4,85 persen. Di sisi lain, subkategori tanaman pangan serta kehutanan dan penebangan kayu mengalami pertumbuhan negatif selama

tiga tahun terakhir yaitu berturut-turut sebesar -9,72 persen dan -0,52 persen. Subkategori kehutanan dan penebangan kayu yang terus melambat seiring dengan pertumbuhan pada subkategori industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya pada tahun yang sama.

**Gambar 2.4. Pertumbuhan Subkategori pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 (Persen)**



## 2.1.2. Pergeseran Struktur Perekonomian Sembilan Tahun Terakhir

### a. Penurunan Kontribusi Kategori Industri Pengolahan, Kategori Pertanian, dan Kategori Perdagangan, Hotel, dan Restoran

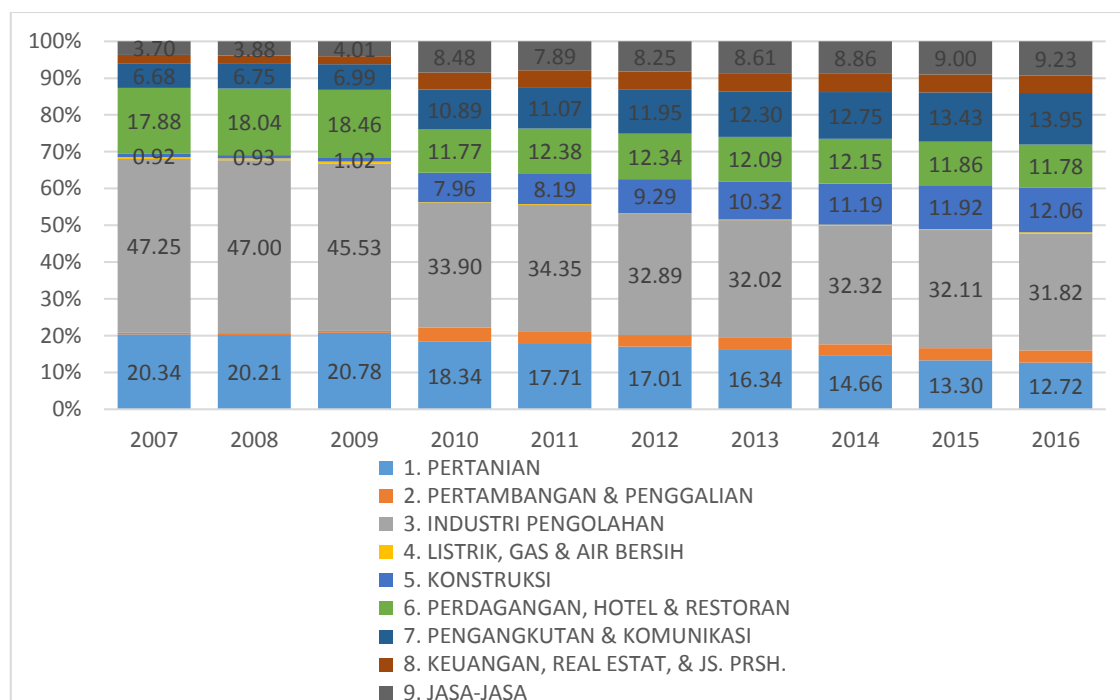
Pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Kubu Raya cukup unik dan relatif berbeda dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Hal ini tercermin dari selama sembilan tahun terakhir, kategori industri pengolahan mengalami penurunan kontribusi yang cukup tinggi. Berdasarkan Gambar 2.5, pada tahun 2007 kontribusi kategori industri pengolahan terhadap total perekonomian Kabupaten Kubu Raya mencapai 47,25 persen, berada pada penyumbang kontribusi tertinggi. Tahun 2016, kontribusi kategori industri pengolahan terhadap perekonomian Kabupaten Kubu Raya menurun menjadi sebesar 31,82 persen atau menurun 15,43 persen. Hal ini merupakan suatu penurunan yang cukup tinggi.

Salah satu faktor terjadinya penurunan tersebut disebabkan karena industri karet, barang dari karet dan plastik yang turut menjadi kontributor pada kategori industri pengolahan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena jumlah pohon karet yang



tidak semakin bertambah. Selain itu, industri kayu, barang dari kayu, dan hasil hutan lainnya di Kabupaten Kubu Raya secara berangsur-angsur mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan semakin sulitnya bahan baku kayu gelondongan. Kondisi ini terutama disebabkan tidak seimbangnya antara penebangan hutan dengan rehabilitasi tanaman baru.

**Gambar 2.5. Perkembangan Struktur Perekonomian Kabupaten Kubu Raya Tahun 2007-2016 (Persen)**



Berdasarkan data tahun 2010, kontribusi terbesar pada kategori industri pengolahan adalah industri makanan dan minuman, yang didominasi oleh industri kelapa sawit. Setelah itu, kontribusi terbesar kedua terhadap kategori industri pengolahan adalah industri karet, barang dari karet dan plastik yaitu sebesar 10,98 persen. Sementara kontribusi industri kayu, barang dari kayu, dan hasil hutan lainnya sebesar 1,68 persen. Tahun-tahun berikutnya, kontribusi industri karet, barang dari karet dan plastik dan industri kayu, barang dari kayu, dan hasil hutan lainnya semakin menurun hingga tahun 2016 kontribusi subkategori tersebut berturut-turut menjadi sebesar 4,33 persen dan 0,96 persen terhadap total kategori industri pengolahan.

Selain industri pengolahan, kategori pertanian juga mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian. Pada tahun 2007, kontribusi nilai tambah bruto kategori pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kubu Raya mencapai sebesar 20,34 persen (kontribusi terbesar kedua). Tahun 2016, kontribusi kategori tersebut menurun menjadi

sebesar 12,72 persen atau menurun sekitar 7,6 persen. Perlu dicermati bahwa penurunan kontribusi tersebut bukan berarti pertumbuhannya yang menurun. Hal ini lebih disebabkan karena pertumbuhan kategori pertanian selama kurun waktu tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya.

Kategori perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami penurunan selama sembilan tahun terakhir. Pada tahun 2007, kontribusi kategori tersebut sebesar 17,88 persen, menurun menjadi sebesar 11,78 persen pada tahun 2016 atau menurun sekitar 6,1 persen. Mencermati penurunan kontribusi kategori industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan, hotel dan restoran perlu ditelaah lebih lanjut. Penurunan kategori perdagangan apakah cenderung dipengaruhi oleh penurunan impor terutama komoditi hasil pertanian dan industri pengolahan, baik yang berasal dari antarkabupaten, antarprovinsi, maupun luar negeri? Jika kondisi tersebut terjadi, maka disarankan perlu meningkatkan produksi komoditi potensi agar Kabupaten Kubu Raya tidak hanya sebagai pemakai atau konsumen tetapi juga menjadi produsen.

#### **b. Peningkatan Kontribusi Kategori Konstruksi, Kategori Pengangkutan dan Komunikasi, dan Kategori Jasa-jasa**

Kategori yang mengalami peningkatan kontribusi selama sembilan tahun terakhir terutama pada kategori konstruksi. Pada tahun 2007 kontribusi kategori konstruksi terhadap perekonomian Kabupaten Kubu Raya sebesar 0,92 persen. Kondisi ini meningkat menjadi sebesar 12,06 persen pada tahun 2016 atau meningkat sekitar 11,1 persen.

Kategori lain yang mengalami peningkatan kontribusi adalah kategori pengangkutan dan komunikasi dan kategori jasa-jasa. Tahun 2007 kontribusi kategori pengangkutan dan komunikasi terhadap perekonomian Kabupaten Kubu Raya sebesar 6,68 persen, meningkat menjadi sebesar 13,95 persen pada tahun 2017 atau meningkat sekitar 7,3 persen. Sementara kategori jasa-jasa, tahun 2007 kontribusi kategori ini sebesar 3,7 persen, meningkat menjadi sebesar 9,23 persen pada tahun 2017 atau meningkat sekitar 5,5 persen.

Peningkatan kategori konstruksi terlihat dari semakin besarnya persentase Anggaran Belanja Pemerintah Daerah (APBD) untuk belanja modal. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka pembangunan kabupaten baru untuk dapat meningkatkan pelayanan yang maksimal terhadap seluruh masyarakat. Sementara itu, peningkatan kategori pengangkutan dan komunikasi didorong oleh meningkatnya

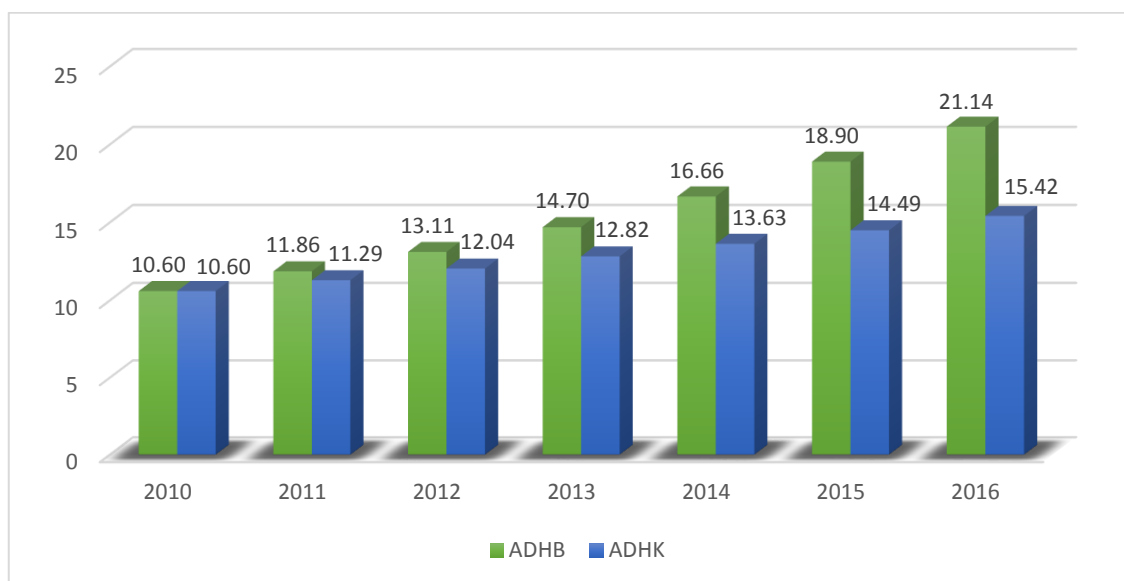
permintaan masyarakat akan transportasi dan komunikasi. Melihat kondisi Kabupaten Kubu Raya yang dihubungkan oleh sungai-sungai, maka terlihat bahwa kebutuhan akan transportasi semakin meningkat.

Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri atau jasa, bahwa setiap perekonomian akan mengalami transformasi yang berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Todaro, 1999).

### 2.1.3. Struktur Perekonomian

Secara absolut, berdasarkan Gambar 2.6, nilai PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2016, PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga berlaku telah mencapai Rp21,14 triliun, atau bertambah Rp10,54 triliun dari tahun 2010 yang sebesar Rp10,6 triliun. Peningkatan ini hampir mencapai dua kali lipat selama enam tahun terakhir. Sementara itu, nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp15,42 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp14,49 triliun.

**Gambar 2.6. Nilai PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2010, 2010 – 2016 (Triliun Rupiah)**



**Tabel 2.2. Distribusi PDRB Kabupaten Kubu Raya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Persen)**

Kategori		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,01	16,34	14,66	13,30	12,72
2	Pertambangan dan Penggalian	3,18	3,07	2,96	3,28	3,27
3	Industri Pengolahan	32,89	32,02	32,32	32,11	31,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,18	0,22	0,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
6	Konstruksi	9,29	10,32	11,19	11,92	12,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,58	10,36	10,44	10,16	10,12
8	Transportasi dan Pergudangan	8,64	9,21	9,69	10,24	10,75
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,76	1,73	1,71	1,71	1,66
10	Informasi dan Komunikasi	3,31	3,10	3,06	3,19	3,20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,47	1,52	1,44	1,41	1,41
12	Real Estate	2,99	3,10	3,03	2,99	3,02
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,44	0,45	0,43
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,84	3,07	3,13	3,29	3,53
15	Jasa Pendidikan	3,61	3,79	4,02	4,04	4,11
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,79	0,79	0,77	0,77	0,71
17	Jasa lainnya	1,00	0,95	0,94	0,90	0,87
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Berdasarkan Tabel 2.2, kategori industri pengolahan, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan serta kategori konstruksi masih menjadi kategori dominan yang mendukung pembentukan perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Kategori industri pengolahan merupakan kategori yang paling besar memberikan sumbangan bagi pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya dan selama kurun waktu 2012-2016 peranannya hampir stabil namun menunjukkan penurunan. Kondisi ini dapat menjadi indikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. Tahun 2016 kategori ini tercatat menyumbang sebesar 31,82 persen bagi PDRB Kabupaten Kubu Raya, sedikit menurun dibandingkan tahun 2012 yang menyumbang sebesar 32,89

persen. Penurunan tersebut disebabkan menurunnya peranan subkategori industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya serta penurunan subkategori industri karet, barang dari karet dan plastik. Meskipun demikian, secara umum kategori industri pengolahan masih menjadi tumpuan dalam perekonomian Kabupaten Kubu Raya terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini didorong oleh masih eksistensinya subkategori industri makanan dan minuman yang terbesar ditopang oleh industri pengolahan kelapa sawit.

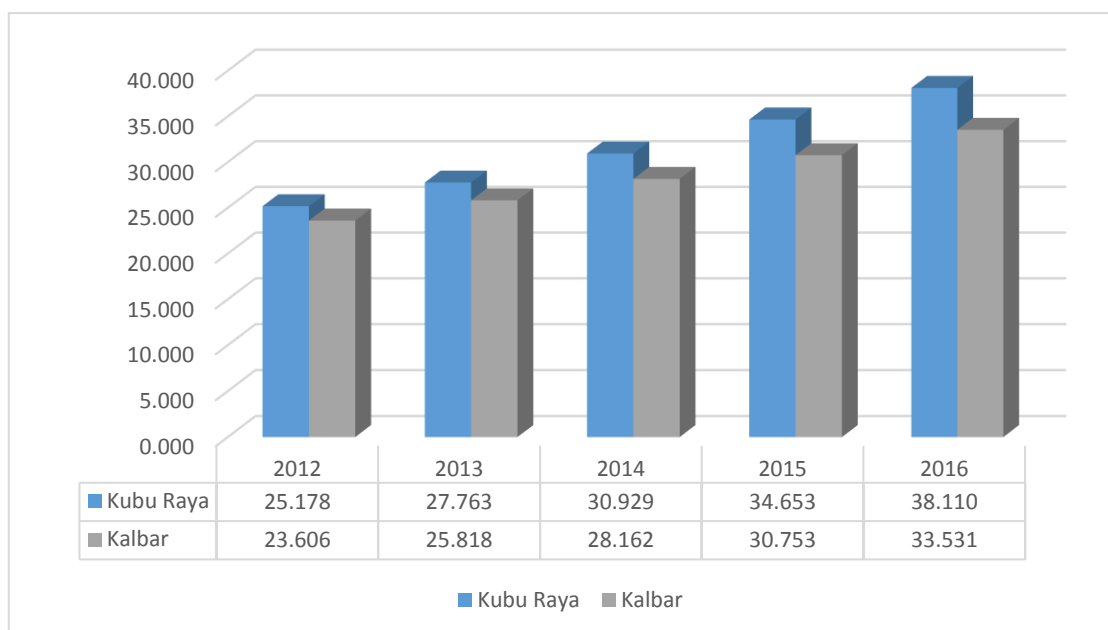
Sementara kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kontributor terbesar kedua dalam perekonomian Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2016, kategori ini menyumbang sebesar 12,72 persen terhadap total PDRB. Namun kontribusi kategori ini perlahan terus berkurang yang mampu mencapai sebesar 17,01 persen pada tahun 2012. Kondisi ini juga dapat menjadi indikasi terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. Penurunan tersebut selain disebabkan menurunnya peranan subkategori tanaman pangan dari tahun ke tahun juga disebabkan menurunnya peranan seluruh subkategori pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meskipun demikian, penyerapan tenaga kerja terbesar di Kabupaten Kubu Raya masih tetap berada pada kategori ini karena waktu kerja yang lebih fleksibel.

Kategori berikutnya yang menjadi penggerak perekonomian Kabupaten Kubu Raya adalah kategori konstruksi. Pembangunan infrastruktur selama lima tahun terakhir mampu meningkatkan peranan kategori ini terhadap total perekonomian. Pada tahun 2016, kategori konstruksi mampu menyumbang sebesar 12,06 persen terhadap PDRB Kabupaten Kubu Raya. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012 yang memberikan sumbangan sebesar 9,29 persen.

#### **2.1.4. Perkembangan Pendapatan Per Kapita**

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran daerah. Secara umum, PDRB per kapita dapat menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Tingkat kemakmuran ini juga dapat dibandingkan antardaerah pada periode yang sama. PDRB per kapita dihitung melalui perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

**Gambar 2.7. Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalbar Tahun 2012-2016 (Juta rupiah)**



Seiring dengan meningkatnya PDRB Kabupaten Kubu Raya, berdasarkan Gambar 2.7 PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya juga mengalami peningkatan. Hal yang sama juga dialami oleh PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat. PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya selalu lebih besar dibandingkan total PDRB per kapita Kalimantan Barat. Tahun 2016, PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp38,11 juta, meningkat sebesar Rp3,5 juta dari tahun 2015 yang sebesar Rp34,65 juta. Sementara itu, PDRB per kapita Kalimantan Barat hanya meningkat sebesar Rp2,8 juta dari tahun 2015 ke 2016. PDRB per kapita sebesar Rp38,11 juta berarti bahwa rata-rata pendapatan satu orang penduduk di Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2016 adalah sebesar 38,11 juta rupiah. Angka ini adalah nilai rata-rata sehingga penyebaran pada setiap penduduk tidak merata dan cenderung akan menambah tingkat kesenjangan di masyarakat.

### 2.1.5. Laju Implisit

Indeks implisit merupakan suatu indeks yang menunjukkan tingkat perkembangan harga di tingkat produsen (*producer price index*). Indeks implisit dihitung melalui perbandingan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan. Sementara laju implisit berarti pertumbuhan dari indeks implisit atau biasa disebut sebagai inflasi atas dasar harga produsen. Indikator ini digunakan untuk

mengetahui adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan pada tingkat harga produsen.

**Tabel 2.3. Indeks Implisit dan Laju Inflasi Atas Dasar Harga Produsen Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016**

Tahun	Indeks Implisit	Laju Inflasi ADH Produsen (%)
(1)	(2)	(3)
2012	108,84	3,61
2013	114,61	5,30
2014	122,28	6,70
2015	130,39	6,63
2016	137,14	5,17

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Berdasarkan Tabel 2.3, indeks implisit di Kabupaten Kubu Raya dari tahun 2012-2016 terus meningkat. Tahun 2016 indeks implisit sebesar 137,14 yang menunjukkan adanya kenaikan harga sebesar 37,14 persen dibandingkan tahun 2010. Sementara laju inflasi atas dasar harga produsen pada tahun 2016 sebesar 5,17 persen yang berarti telah terjadi kenaikan harga sebesar 5,17 persen dibandingkan tahun 2015. Salah satu faktor yang memengaruhi inflasi ini antara lain kenaikan harga-harga pada tingkat input, berupa bahan baku, bahan penolong, dan lainnya yang berdampak terhadap peningkatan biaya faktor produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan biaya per satuan unit output.

#### 2.1.6. Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Informasi mengenai sumber pertumbuhan ekonomi tentu sangat bermanfaat untuk mengetahui atau mengidentifikasi kategori-kategori ekonomi yang berperan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sumber pertumbuhan ekonomi dihitung melalui kontribusi setiap kategori atas dasar harga konstan dengan pertumbuhan ekonomi total pada tahun berjalan.

**Tabel 2.4. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016 (Persen)**

Kategori	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,13	1,12	1,02	0,99	0,97
Pertambangan dan Penggalian	0,22	0,21	0,19	0,19	0,19
Industri Pengolahan	2,22	2,13	2,07	2,11	2,08
Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,69	0,68	0,66	0,68	0,67
Transportasi dan Pergudangan	0,53	0,52	0,50	0,51	0,53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10
Informasi dan Komunikasi	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10
Real Estate	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19
Jasa Pendidikan	0,22	0,22	0,22	0,23	0,23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
Jasa lainnya	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Lapangan Usaha 2012-2016

Berdasarkan Tabel 2.4, kategori yang memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah kategori industri pengolahan, yaitu sebesar 2,08 persen dari total pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sebesar 0,97 persen, dan kategori konstruksi sebesar 0,7 persen. Sementara kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta kategori pengadaan listrik dan gas memberikan kontribusi terkecil yang tidak mencapai 0,03 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi tahun 2016.

Kategori industri pengolahan, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan serta kategori konstruksi yang merupakan tiga kontributor utama terhadap total perekonomian Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 juga turut berkontribusi sebagai tiga kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi total pada tahun yang sama. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, ketiga kategori tersebut masih menjadi kontributor utama.



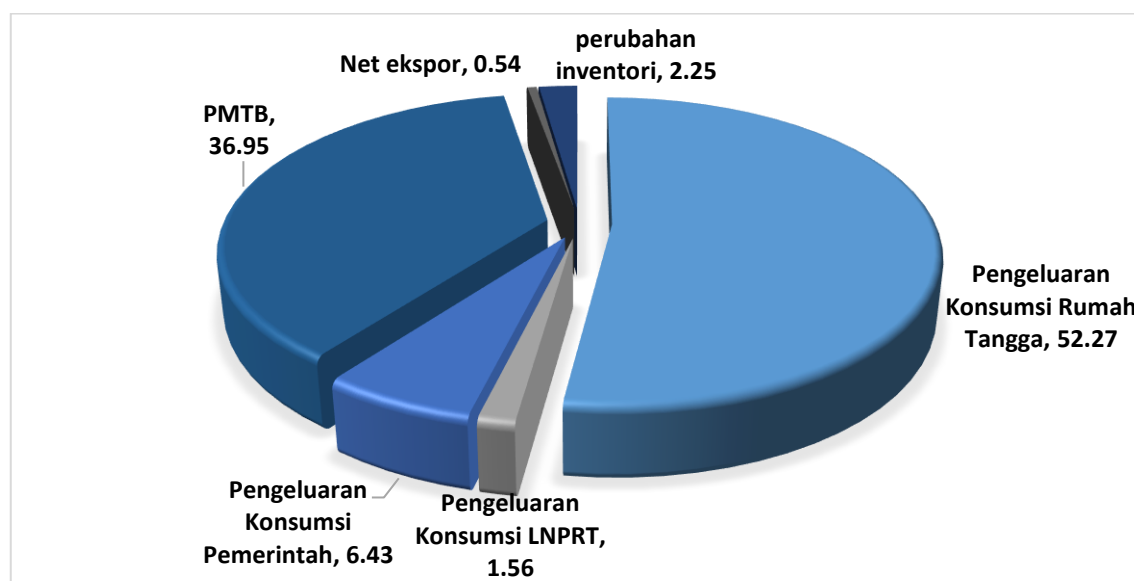
Sementara itu, kategori-kategori yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi ternyata tidak selalu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi. Kategori pengadaan listrik dan gas misalnya, dengan pertumbuhan sebesar 32,29 persen ternyata hanya memberikan sumbangan 0,02 persen terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya. Sebaliknya, kategori industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,12 persen mampu menyumbang 2,08 persen bagi pertumbuhan ekonomi, juga kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 3,69 persen menyumbang 0,97 persen pada tahun 2016.

## 2.2. Perkembangan Perekonomian Menurut Penggunaan (*Expenditure Approach*)

### 2.2.1. Struktur Perekonomian

Melihat struktur perekonomian Kabupaten Kubu Raya dari sisi penggunaan, peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga masih sangat penting dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Gambar 2.8, konsumsi rumah tangga mencapai sebesar 52,27 persen terhadap total PDRB pada tahun 2016. Selanjutnya kontributor kedua adalah PMTB, yaitu sebesar 36,95 persen, pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 6,43 persen, perubahan inventori sebesar 2,25 persen, pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 1,56 persen, dan kontributor terkecil yaitu net ekspor sebesar 0,55 persen.

**Gambar 2.8. Struktur PDRB Kabupaten Kubu Raya Menurut Penggunaan Tahun 2016**



Secara absolut, penggunaan PDRB untuk konsumsi rumah tangga terus meningkat dan penggunaannya lebih dari separuh terhadap total PDRB. Berdasarkan Tabel 2.5, pada tahun 2016 konsumsi rumah tangga mencapai sebesar Rp11,05 triliun dan pada tahun 2015 nilai konsumsi rumah tangga sebesar Rp9,89 triliun. Selama dua tahun terakhir, konsumsi rumah tangga telah meningkat sebesar Rp1,16 triliun. Jika dilihat lebih rinci, konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kubu Raya lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dibandingkan kebutuhan nonmakanan. Tahun 2016, konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman beralkohol mencapai nilai Rp6,02 triliun, sedangkan konsumsi untuk nonmakanan sebesar Rp5,03 triliun. Pada tahun 2015, konsumsi rumah tangga untuk makanan dan minuman beralkohol sebesar Rp5,35 triliun dan konsumsi untuk nonmakanan sebesar Rp4,54 triliun. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2016 hampir 54,44 persen pengeluaran konsumsi rumah tangga digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman beralkohol, sedangkan sisanya untuk konsumsi nonmakanan.

Konsumsi pemerintah yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah serta pertahanan dan keamanan. Komponen ini sebenarnya dapat menjadi motor pemicu meningkatnya komponen PDRB penggunaan yang lain. Belanja pegawai misalnya dapat mendorong tingkat konsumsi rumah tangga, sementara dari belanja barang modal dapat mendorong pembentukan modal di daerah. Peranan konsumsi pemerintah di Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 mencapai Rp1,36 triliun, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,4 triliun.

**Tabel 2.5. PDRB Kabupaten Kubu Raya Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2012-2016 (Miliar Rp)**

Komponen	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	7.140,50	8.029,73	8.804,92	9.890,21	11.052,21
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	192,24	229,05	263,56	292,52	330,23
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	961,55	1.084,11	1.259,93	1.400,44	1.359,95
PMTB	4.628,47	5.232,76	6.051,08	6.975,91	7.811,61
Ekspor	9.644,49	9.206,62	10.523,19	11.329,02	11.563,45
Impor	9.561,64	9.275,98	10.493,03	11.305,00	11.450,00
PDRB	13.005,61	14.506,29	16.409,65	18.583,10	20.667,45

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Pengeluaran 2012-2016

Penggunaan lain yang cukup besar dari PDRB adalah untuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Komponen ini juga memiliki peran yang cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya. Secara absolut PMTB terus meningkat, yaitu mencapai sebesar Rp7,81 triliun pada tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp6,97 triliun atau meningkat sebesar Rp835,7 miliar selama tahun 2015-2016. Investasi yang ditanamkan di berbagai sektor ekonomi diharapkan akan berhasil meningkatkan produksi sehingga akan lebih mendorong ekspor.

Dalam perekonomian, selain investasi, perdagangan antardaerah dan luar negeri dalam hal ini ekspor dan impor juga mempunyai peranan penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selama ini, neraca perdagangan Kabupaten Kubu Raya masih positif artinya nilai ekspor masih lebih tinggi dibandingkan nilai impor, namun nilai ekspor tidak jauh lebih besar dari nilai impor sehingga menghasilkan net ekspor yang bernilai kecil.

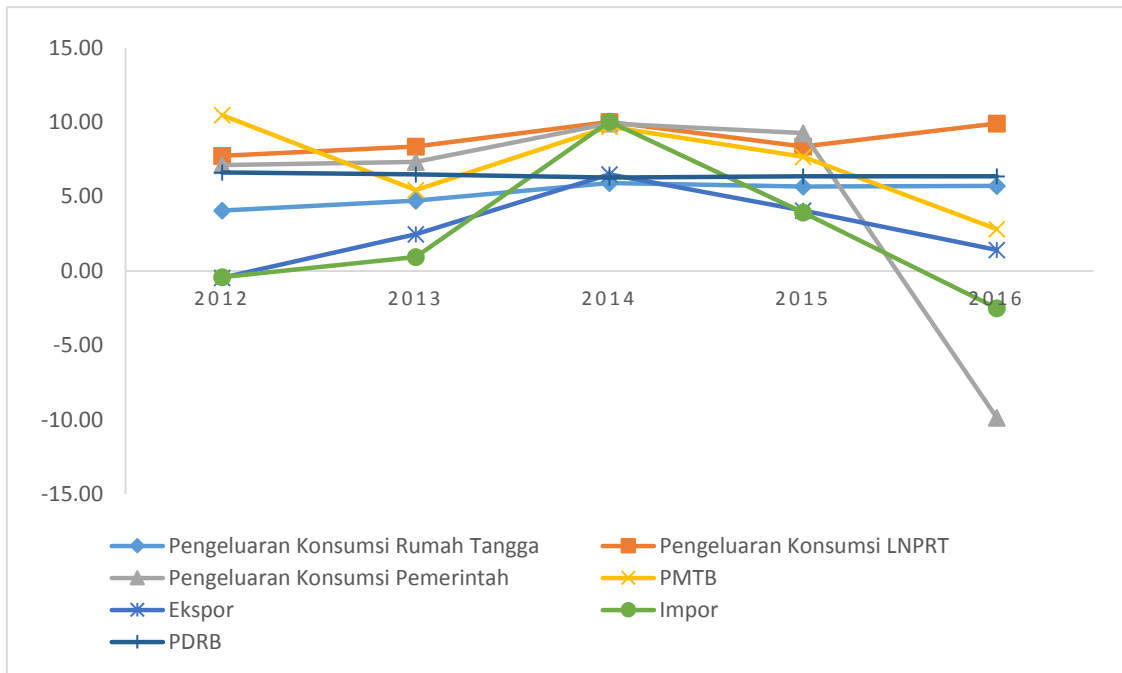
Pengalaman empiris menunjukkan bahwa semakin maju suatu daerah, maka peran konsumsi rumah tangga semakin kecil dan sebaliknya, semakin terbelakang suatu daerah maka peranan konsumsinya semakin besar. Di negara maju yang masyarakatnya berpendapatan tinggi, sebagian besar pendapatan tersebut tidak selalu digunakan untuk konsumsi tetapi ditabung untuk investasi.

Dari uraian sebelumnya tampak bahwa peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kubu Raya masih lebih tinggi dibandingkan investasi yang tercermin dari PMTB. Pola pengeluaran penduduk pun kecenderungan sebagian besar bersifat konsumtif, yaitu pendapatan yang diterima lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan.

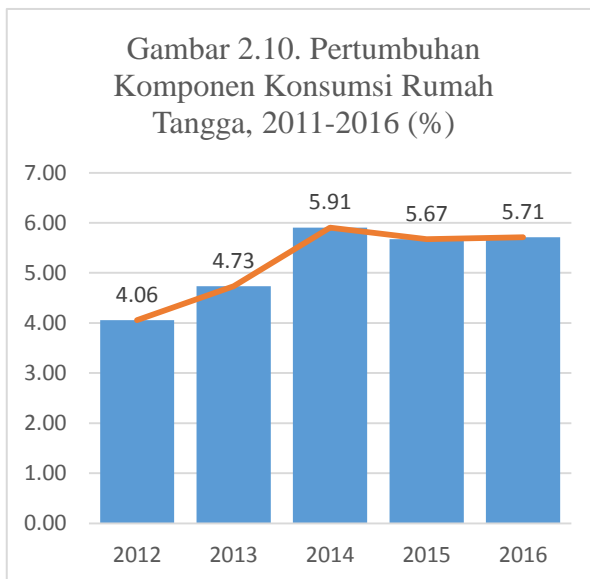
### **2.2.2. Pertumbuhan Ekonomi**

Jika dilihat lebih rinci, terlihat bahwa beberapa komponen PDRB penggunaan mengalami pertumbuhan positif. Ini mengindikasikan kinerja komponen penggunaan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2016, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT sebesar 9,91 persen dan diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mencapai 5,71 persen, komponen PMTB tumbuh sebesar 2,81 persen, dan komponen ekspor tumbuh sebesar 1,42 persen. Di sisi lain, komponen konsumsi pemerintah tumbuh negatif sebesar -9,87 persen dan komponen impor sebesar -2,51 persen pada tahun 2016.

**Gambar 2.9. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kubu Raya Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2012-2016 (Persen)**



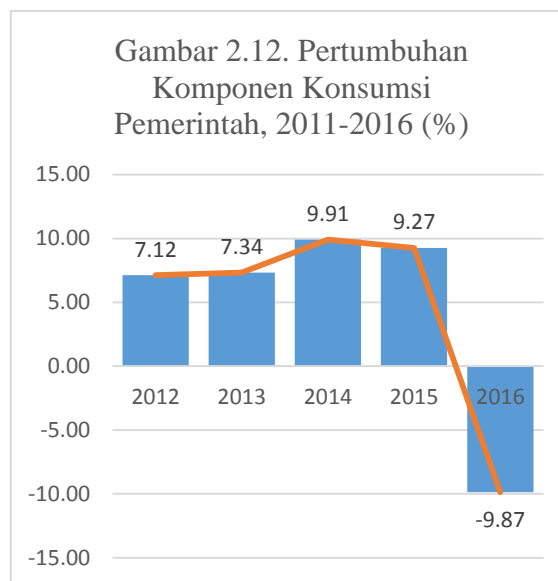
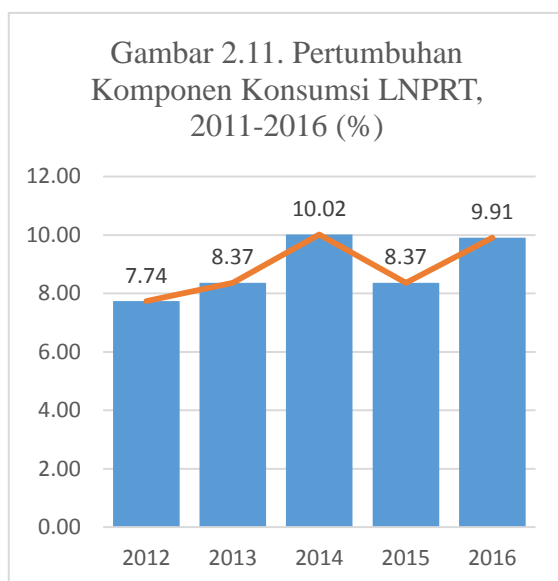
Komponen konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan 5,71 persen. Meskipun pertumbuhannya bukan yang tertinggi, namun komponen



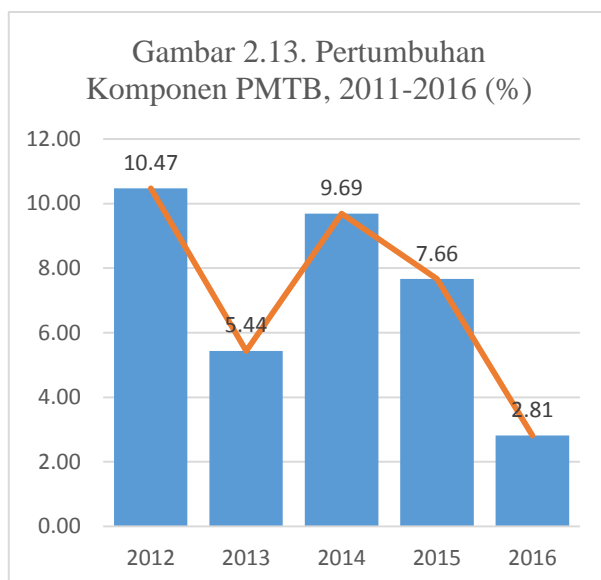
konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten Kubu Raya. Nilai komponen konsumsi rumah tangga yang dihitung atas dasar harga konstan 2010, tahun 2016 mencapai Rp7,75 triliun. Selama tiga tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga sekitar 5,76 persen. Meski secara absolut meningkat, namun pertumbuhan pengeluaran konsumsi

rumah tangga tahun 2016 di bawah rata-rata pertumbuhan selama tiga tahun terakhir. Hal ini dapat memberikan sinyal positif bahwa sifat konsumtif penduduk mulai menurun.

Sementara itu, komponen pengeluaran konsumsi LNPRT kembali meningkat pada tahun 2016, yaitu tumbuh sebesar 9,91 persen setelah pada tahun 2015 mengalami perlambatan yaitu tumbuh sebesar 8,37 persen. Nilai komponen konsumsi LNPRT yang dihitung atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2016 mencapai Rp179,4 miliar.



Komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan yang negatif pada tahun 2016, yaitu sebesar -9,87 persen. Hal ini merupakan pertumbuhan terendah yang pernah dicapai komponen konsumsi pemerintah selama kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2016 sebesar Rp1,06 triliun atau hampir sama dengan nilai tambah konsumsi pengeluaran pemerintah pada tahun 2013.



Sementara itu, komponen PMTB yang juga memiliki porsi cukup besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 atas dasar harga konstan mencapai Rp5,4 triliun, hanya meningkat sebesar 2,81 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,26 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih lambat dari tahun 2015 yang mencapai sebesar 7,66 persen. Namun, kondisi tiga tahun terakhir

menunjukkan perlambatan pertumbuhan komponen PMTB yang secara rata-rata tumbuh sekitar 7,2 persen dari tahun 2012-2016.

# **BAB 3**

**KETENAGAKERJAAN,  
INVESTASI, DAN  
KEUANGAN DAERAH**



## Bab

## 3

## KETENAGAKERJAAN, INVESTASI, DAN KEUANGAN DAERAH

*Bab ini berisi tentang kondisi ketenagakerjaan mulai dari penyerapan tenaga kerja, pengangguran, ILOR, perkembangan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing, ICOR, serta keuangan pemerintah daerah*

Untuk melakukan pembangunan di suatu bangsa atau daerah diperlukan modal dasar. Modal dasar yang diperlukan pembangunan pada hakekatnya bersumber dari tiga unsur utama, yaitu: ketersediaan sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Sebagai salah satu modal dasar pembangunan, modal berperan sebagai sumber penggerak roda perekonomian yang digunakan dalam membangun dan atau mengembangkan usaha.

### 3.1. Ketenagakerjaan

#### 3.1.1 Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Kategori

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu daerah. Adapun ukuran yang sering dipakai untuk menilai ketenagakerjaan suatu daerah adalah penyerapan tenaga kerja, pengangguran, dan tingkat produktivitas relatif tenaga kerja.

Tenaga kerja yang sering dipergunakan dalam berbagai kajian dibatasi pada penduduk usia 15 tahun ke atas. Adapun penduduk usia 15 tahun ke atas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan disebut dengan angkatan kerja, sedangkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bukan angkatan kerja diantaranya mengurus rumah tangga, sekolah, lanjut usia (lansia) dan lain-lain.

Data-data yang terkait dengan ketenagakerjaan diperoleh melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2016 jumlah sampel Sakernas tidak cukup untuk mendapatkan angka

estimasi sampai tingkat kabupaten. Dengan demikian, untuk mendapatkan indikator-indikator yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada tahun 2016 dilakukan estimasi.

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja semakin meningkat pada empat tahun terakhir. Pada tahun 2012 hingga tahun 2016, sebagian besar penduduk Kabupaten Kubu Raya bekerja pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2012, terdapat 101.004 (47,18 persen) penduduk Kabupaten Kubu Raya yang bekerja pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Jumlah ini berkurang pada tahun 2013 yaitu sebesar 78.963 orang. Kemudian, meningkat kembali pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Pada tahun 2016, terdapat 121.499 penduduk Kabupaten Kubu Raya yang bekerja pada kategori tersebut. Hal ini berarti hampir setengah dari penduduk Kabupaten Kubu Raya yang berusia di atas 15 tahun bekerja di kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2016.

**Tabel 3.1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012-2016**

Lapangan Pekerjaan Utama	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	101 .004	78 .963	111 .984	113 .444	121 .499
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	42 .732	47 .857	47 .163	48 .154	50 .184
Industri Pengolahan	15 .382	14 .981	17 .100	17 .520	18 .337
Konstruksi	19 .865	21 .876	23 .552	17 .355	16 .862
Jasa-Jasa	25 .330	25 .423	23 .722	34 .260	38 .611
Lainnya	9 .770	13 .220	6 .165	12 .653	13 .888
<b>Jumlah</b>	<b>214 .083</b>	<b>202 .320</b>	<b>229 .686</b>	<b>243 .386</b>	<b>259 .380</b>

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2013-2016

Keterangan: \* merupakan angka estimasi

Jasa-jasa meliputi kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya.

Lainnya meliputi kategori Pertambangan dan Penggalian, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Real Estate, Jasa Perusahaan

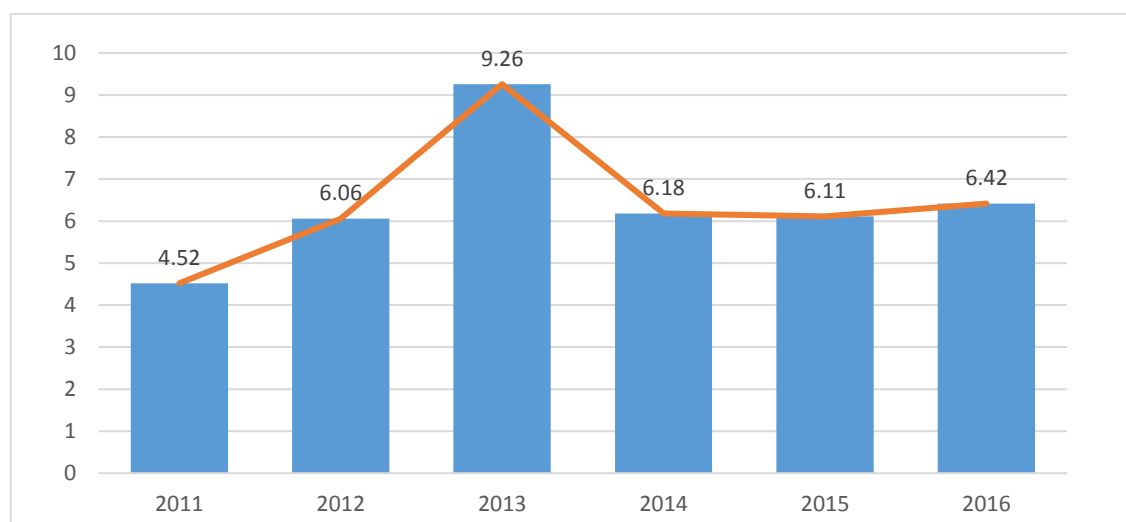


Sementara kategori terbesar kedua yang memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja adalah perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. Pada tahun 2012, penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja pada kategori ini sebanyak 42.732 orang atau sekitar 19,96 persen. Selanjutnya terus meningkat hingga tahun 2016 sebanyak 50.184 orang (19,35 persen). Secara absolut penduduk yang bekerja pada kategori ini meningkat, namun secara persentase ternyata mengalami penurunan.

### 3.1.2. Pengangguran

Indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Ukuran ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja pada wilayah tertentu. Menurut konsep BPS, yang dimaksud dengan pengangguran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas atau angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

**Gambar 3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011-2016**



Berdasarkan Gambar 3.1, dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kubu Raya tahun 2011 adalah sebesar 4,52 persen. TPT 4,52 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) terdapat sebanyak 4 sampai 5 orang merupakan pengangguran. Nilai TPT Kabupaten Kubu Raya terus meningkat dan mencapai 9,26 persen pada tahun

2013. Lalu, tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 6,18 persen pada tahun 2014. Berdasarkan estimasi, pada tahun 2016, tingkat pengangguran di Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar 6,42 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada umumnya terdapat beberapa latar belakang alasan kelompok usia muda ikut terjun ke pasar kerja, diantaranya kesulitan ekonomi keluarga sehingga memaksa mereka untuk berhenti sekolah/kuliah dan terpaksa memasuki dunia kerja. Sebaliknya, sulitnya mendapatkan pekerjaan karena terbatasnya lapangan pekerjaan serta kurangnya pengalaman dan keahlian menyebabkan mereka ikut terjebak dalam kelompok pengangguran. Hal ini menambah akumulasi jumlah penganggur menjadi lebih banyak. Faktor-faktor lainnya ialah kelompok usia muda umumnya masih bersifat idealis termasuk dalam memilih pekerjaan, misalnya sesuai keinginan, keahlian, hobi, standar gaji, dan gengsi. Akibatnya lapangan pekerjaan mereka menjadi terbatas. Selain itu, kelompok usia ini belum memiliki banyak beban tanggungan ekonomi keluarga dan masih ada jaring pengaman ekonomi baginya yaitu keluarga dan masyarakat sosialnya.

### **3.1.3. Tingkat Produktivitas Relatif**

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu ukuran yang diperhatikan baik pada suatu negara maupun wilayah dalam mencapai tujuannya. Hal ini disebabkan sumber daya manusia merupakan elemen yang penting dalam suatu negara atau wilayah. Produktivitas tenaga kerja dapat diukur dengan Tingkat Produktivitas Relatif (TPR). TPR merupakan perbandingan antara kontribusi nilai tambah suatu kategori terhadap PDRB terhadap kontribusi penyerapan tenaga kerja setiap kategori. Dengan demikian, TPR mencerminkan perbandingan produktivitas secara relatif antara kategori ekonomi.

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat dilihat bahwa terdapat ketimpangan tingkat produktivitas relatif (TPR) antarbeberapa kategori ekonomi. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, serta kategori jasa-jasa memiliki TPR yang relatif rendah dibandingkan dengan kategori lainnya, yaitu berturut-turut sebesar 0,34; 0,54; dan 0,59. Sementara TPR pada kategori industri pengolahan merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 4,57.

**Tabel 3.2. Tingkat Produktivitas Relatif (TPR) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016**

Kategori	Tenaga Kerja (%)	PDRB (%)	TPR
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,84	16,13	0,34
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19,35	10,44	0,54
Industri Pengolahan	7,07	32,32	4,57
Konstruksi	6,50	11,19	1,72
Jasa-Jasa	14,89	8,86	0,59
Lainnya	5,35	21,06	3,93
	100,00	100,00	

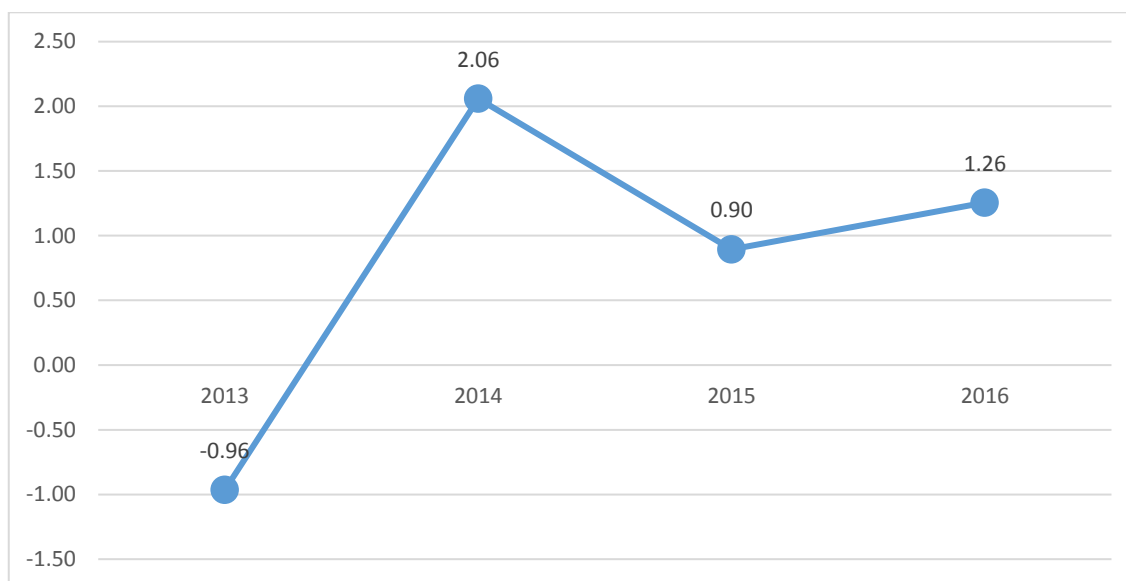
Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2017

Terjadinya ketimpangan antara beberapa kategori ekonomi tersebut diduga salah satunya terkait dengan penggunaan teknologi. Sebagai contoh pada kategori industri pengolahan sebagian besar bersifat padat modal, artinya penyerapan tenaga kerja diikuti dengan penggunaan teknologi seperti mesin-mesin yang digunakan, komputer, mesin hitung, dan lainnya. Sementara pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagian besar menggunakan tenaga kerja manusia atau padat karya.

#### **3.1.4. Incremental Labour Output Rasio (ILOR)**

*Incremental Labour Output Rasio* (ILOR) merupakan suatu koefisien yang menunjukkan besarnya tambahan tenaga kerja baru yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. ILOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan tenaga kerja dengan tambahan output. Nilai ILOR menunjukkan jumlah tenaga kerja yang terserap menurut laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah pada suatu periode tertentu.

Pada Gambar 3.2 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada koefisien ILOR pada Kabupaten Kubu Raya selama periode 2013 hingga 2016. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja sedangkan nilai negatif menyatakan sebaliknya. Pada tahun 2013, koefisien ILOR Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar -0,96. Nilai ini meningkat menjadi 2,06 pada tahun 2014. Kemudian, kembali turun pada tahun 2015 menjadi 0,90 dan meningkat menjadi 1,26 pada tahun 2016.

**Gambar 3.2. Koefisien ILOR Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013-2016**

Pada tahun 2013 koefisien ILOR Kabupaten Kubu Raya bernilai -0,96 yang dapat diartikan sebagai adanya penurunan jumlah tenaga kerja/penduduk bekerja pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012. Kondisi ini sejalan dengan TPT Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2013 yang meningkat dibandingkan tahun 2012. Berdasarkan fenomena yang terjadi dapat ditarik kesimpulan bahwa penurunan jumlah penduduk bekerja disebabkan karena beralih menjadi pengangguran.

Nilai koefisien ILOR sebesar 1,26 yang dicapai pada tahun 2016 dapat diinterpretasikan bahwa setiap penambahan 100 juta rupiah output maka akan menyerap sebesar 126 tenaga kerja pada tahun 2016.

**Tabel 3.3. Koefisien ILOR Menurut Kategori di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015-2016**

Kategori	2015	2016
(1)	(2)	(3)
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,82	1,86
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,31	0,77
Industri Pengolahan	0,38	0,92
Konstruksi	-4,25	-0,34
Jasa-Jasa	4,14	1,71
Lainnya	7,02	3,43
<b>Kubu Raya</b>	<b>0,90</b>	<b>1,26</b>

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2017

Berdasarkan Tabel 3.3, pada tahun 2016 koefisien ILOR tertinggi pada kategori Lainnya sebesar 3,43, menurun dibandingkan tahun 2015 yang bernilai sebesar 7,02. Hal ini berarti setiap penambahan 100 juta rupiah output pada kategori lainnya maka akan menyerap sebesar 343 tenaga kerja pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2015 setiap penambahan 100 juta rupiah output maka akan menyerap sebesar 702 tenaga kerja.

Di sisi lain, koefisien ILOR pada kategori konstruksi selama dua tahun terakhir bernilai negatif. Pada tahun 2015 koefisien ILOR bernilai -4,25 yang berarti bahwa setiap penambahan 100 juta rupiah output pada kategori konstruksi maka terdapat penurunan 425 tenaga kerja. Sementara pada tahun 2016, koefisien ILOR meningkat menjadi -0,34 yang berarti bahwa setiap penambahan 100 juta rupiah output pada kategori konstruksi maka terdapat penurunan 34 tenaga kerja. Nilai negatif pada kategori konstruksi dapat disebabkan oleh karakteristik kategori ini yang sebagian besar merupakan buruh bangunan sehingga jika tidak terdapat proyek bisa langsung beralih pada lapangan usaha lain.

## **3.2. Investasi**

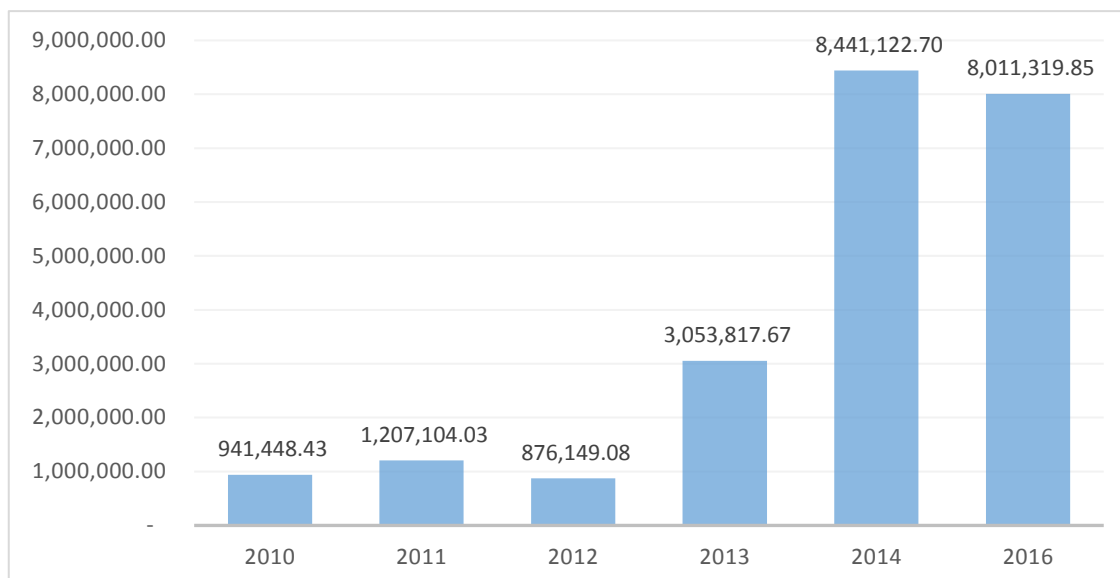
Berdasarkan pendekatan penggunaan, perekonomian suatu daerah terdiri dari konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, konsumsi lembaga nonprofit, pembentukan modal atau investasi, net ekspor, dan perubahan stok. Investasi dapat berupa investasi pada kegiatan atau perusahaan yang baru didirikan atau pada perusahaan yang sudah berdiri dengan tujuan sebagai penambahan barang modal untuk meningkatkan kapasitas usaha/perusahaan.

Investasi dapat bersumber baik dari pemerintah maupun swasta. Investasi pemerintah dapat dilihat baik melalui proyek Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan Nasional (APBN). Sementara itu, investasi swasta berasal dari dalam negeri yang disebut dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan dari asing yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA).

### **3.2.1. Investasi yang Bersumber Dari Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Berikut merupakan perkembangan nilai investasi dari proyek PMDN di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 sampai dengan 2016.

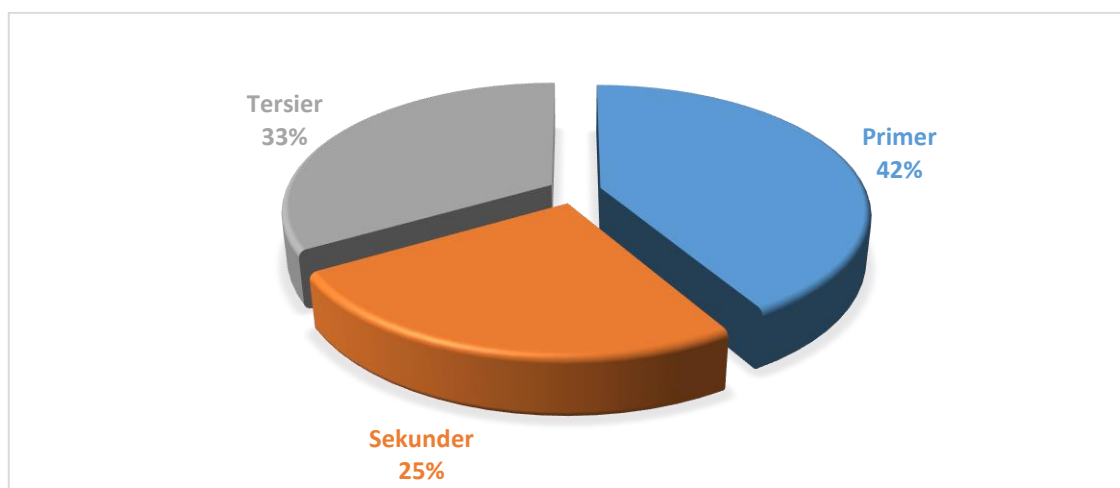
**Gambar 3.3. Perkembangan Nilai Investasi PMDN Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2016 (Juta Rp)**



Keterangan: Data tahun 2015 tidak tersedia

Berdasarkan Gambar 3.3, pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, nilai investasi yang bersumber dari PMDN di Kabupaten Kubu Raya cukup rendah. Nilai ini secara bertahap meningkat menjadi Rp3,05 triliun pada tahun 2013. Kemudian, meningkat cukup besar menjadi Rp8,44 triliun pada tahun 2014. Pada tahun 2016, nilai PMDN Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp8,01 triliun.

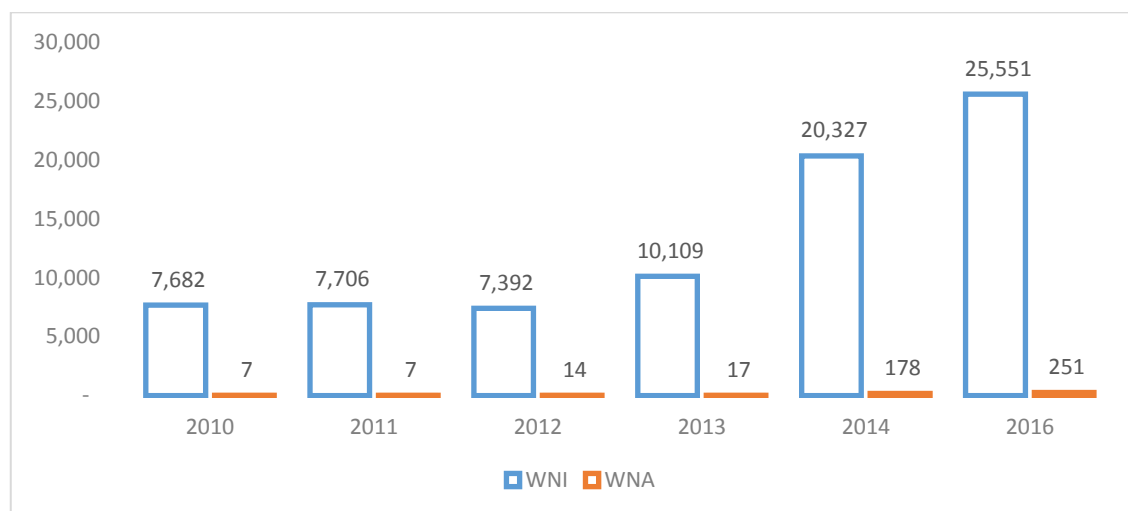
**Gambar 3.4. Persentase Nilai Investasi PMDN Kabupaten Kubu Raya Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016**



Dilihat dari sektor ekonomi, nilai investasi yang bersumber dari PMDN di Kabupaten Kubu Raya terbesar terdapat pada sektor primer yaitu sebesar 42 persen. Sektor dengan PMDN terbesar kedua adalah sektor tersier yaitu sebesar 33 persen.

Sementara itu, sektor sekunder menempati urutan terakhir yaitu sebesar 25 persen pada tahun 2016.

**Gambar 3.5. Perkembangan Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja Proyek PMDN Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2016 (Orang)**



Selain investasi, proyek PMDN juga memberi kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Gambar 3,5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja WNI yang diserap proyek PMDN adalah sebanyak 7.682 orang. Seiring dengan peningkatan investasi PMDN, terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja WNI yang relatif besar pada tahun 2014 dan tahun 2016 yaitu berturut-turut sebesar 20.327 orang dan 25.551 orang.

Sementara itu, penyerapan tenaga kerja WNA cenderung lebih sedikit daripada WNA. Kenaikan penyerapan tenaga kerja WNA juga terjadi pada tahun 2014 dan tahun 2016 yaitu berturut-turut sebesar 178 orang dan 251 orang.

### 3.2.2. Investasi Bersumber dari Proyek Penanaman Modal Asing (PMA)

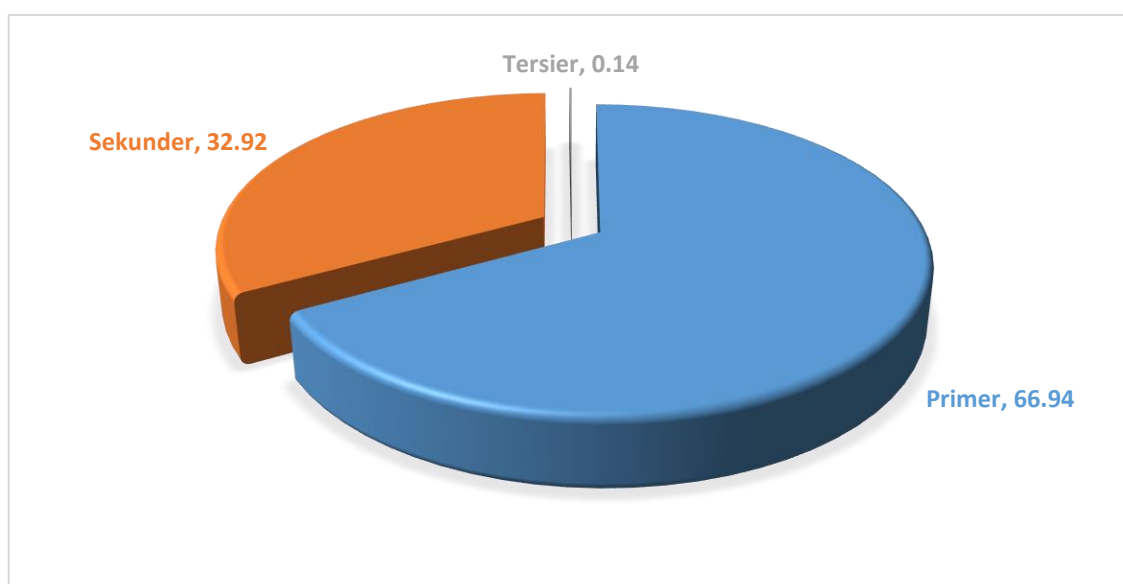
Penanaman modal bukan hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari asing yang disebut dengan Penanaman Modal Asing (PMA). Perkembangan nilai investasi PMA di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada Gambar 3.6.

**Gambar 3.6. Perkembangan Nilai Investasi PMA Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010-2016 (Juta Rp)**



Berdasarkan Gambar 3.6 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada perkembangan nilai investasi PMA di Kabupaten Kubu Raya. Pada tahun 2010, nilai investasi PMA di Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp432 miliar. Kemudian, nilai ini meningkat menjadi Rp1,59 triliun pada tahun 2011. Pada tahun 2016, nilai investasi PMA di Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp1,86 triliun.

**Gambar 3.7. Persentase Nilai Investasi PMA Kabupaten Kubu Raya Menurut Sektor Ekonomi Tahun 2016**

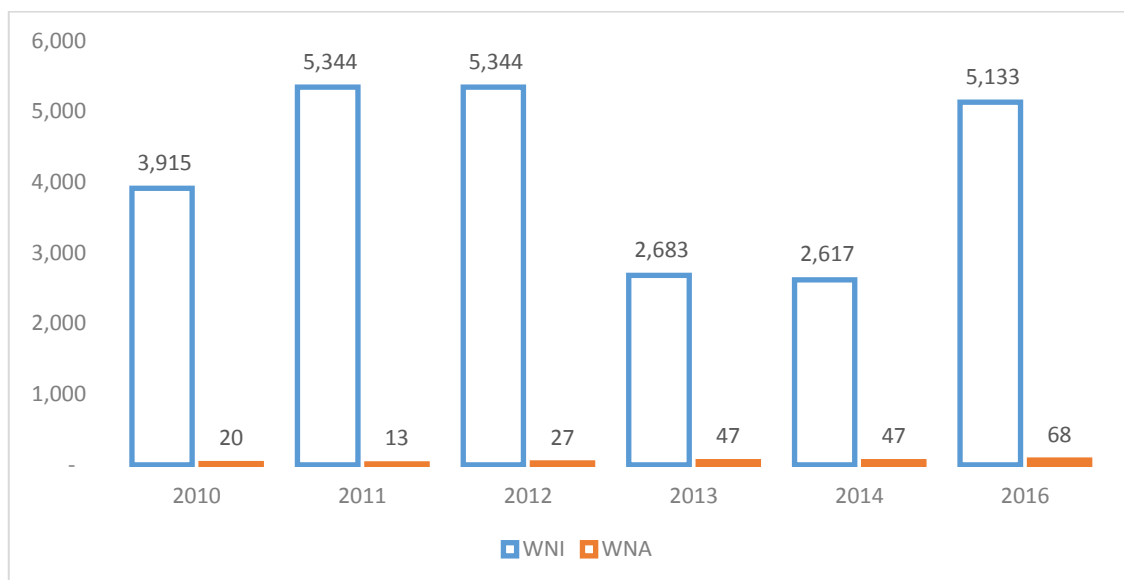


Dilihat dari sektor ekonomi, nilai investasi yang bersumber dari PMA di Kabupaten Kubu Raya terbesar terdapat pada sektor primer yaitu sebesar 66,94 persen.



Berbeda dengan PMDN, investasi yang bersumber dari PMA terbesar kedua adalah sektor sekunder yaitu sebesar 32,92 persen. Sementara itu, sektor tersier menempati urutan terakhir yaitu sebesar 0,14 persen pada tahun 2016.

**Gambar 3.8. Perkembangan Penyerapan Jumlah Tenaga Kerja Proyek PMA Kabupaten Kubu Raya, 2010-2016 (Orang)**



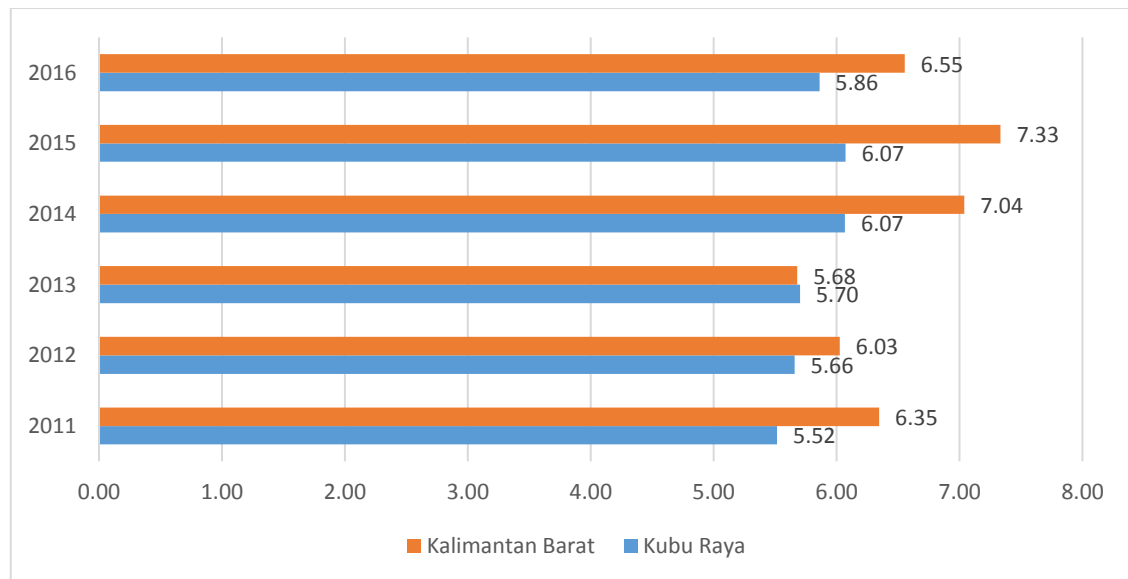
Selain investasi, proyek PMA juga memberi kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Gambar 3.8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2010, jumlah tenaga kerja WNI yang diserap proyek PMA adalah sebanyak 3.915 orang. Seiring dengan meningkatnya nilai PMA, pada tahun 2011 penyerapan tenaga kerja WNI juga meningkat menjadi sebanyak 5.344 orang. Pada tahun 2016, proyek PMA menyerap tenaga kerja WNI sebanyak 5.133 orang.

Proyek PMA bukan hanya menyerap tenaga kerja WNI, tetapi juga WNA. Namun, penyerapan tenaga kerja WNA cenderung lebih sedikit daripada WNA. Pada tahun 2010, proyek PMA menyerap tenaga kerja WNA sebesar 20 orang. Sementara itu, penyerapan tenaga kerja WNA terjadi pada tahun 2016 adalah sebesar 68 orang.

### 3.2.3. *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)*

Untuk melihat tingkat efisiensi penanaman modal di wilayah tertentu, ukuran yang biasanya digunakan adalah ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*). Indikator ini merupakan rasio antara nilai investasi dengan pertambahan output dalam periode tertentu dalam suatu wilayah.

**Gambar 3.9. Koefisien ICOR Kabupaten Kubu Raya dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2016**



Pada Gambar 3.9 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi pada koefisien ICOR baik pada Provinsi Kalimantan Barat maupun Kabupaten Kubu Raya selama periode 2011-2016. Koefisien ICOR tertinggi pada Provinsi Kalimantan Barat terdapat pada tahun 2014 dan 2015 yaitu berturut-turut sebesar 7,04 dan 7,33. Sementara itu, koefisien ICOR tertinggi pada Kabupaten Kubu Raya juga terdapat pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 6,07.

Pada tahun 2016 koefisien ICOR Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 6,55. Hal ini berarti untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen maka diperlukan pertumbuhan investasi minimal sebesar 6,55 persen di Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, pada tahun 2016 koefisien ICOR Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar 5,86. Hal ini berarti, untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen maka diperlukan pertumbuhan investasi minimal sebesar 5,86 persen pada tahun 2016. Menurut Widodo (1990), koefisien ICOR yang memiliki produktivitas investasi yang baik berkisar antara 3-4. Dengan demikian, koefisien ICOR Kabupaten Kubu Raya

sebesar 5,86 berarti produktivitas investasi Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 termasuk dalam kategori belum efisien.

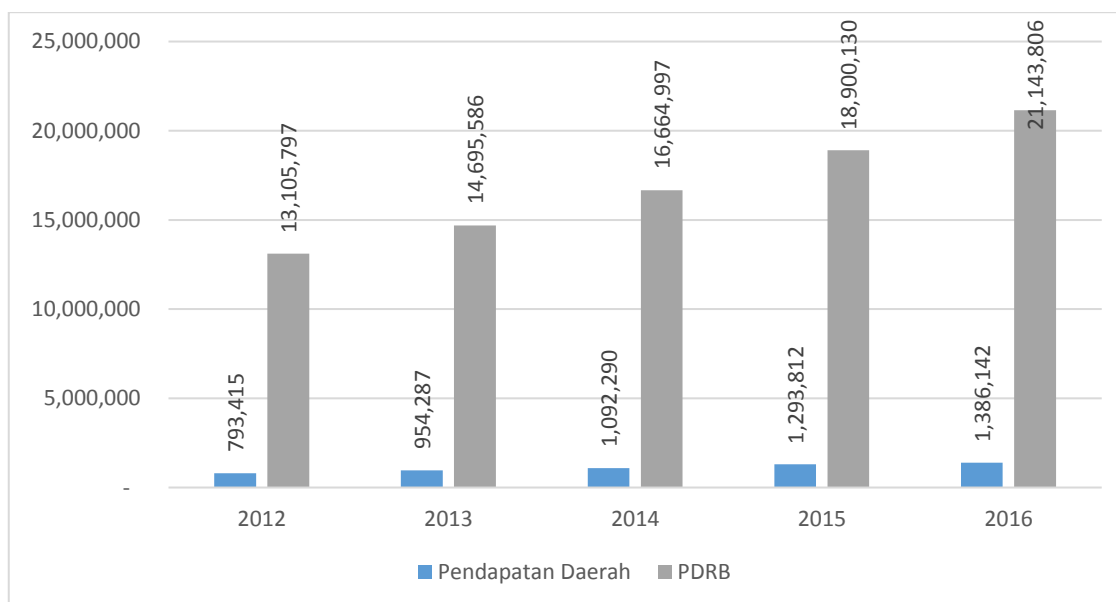
Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, koefisien ICOR Kabupaten Kubu Raya berada dibawah koefisien ICOR Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016. Hal ini berarti investasi di Kabupaten Kubu Raya relatif lebih efisien jika dibandingkan rata-rata kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

### 3.3. Keuangan Daerah

#### 3.3.1. Penerimaan Daerah

Pemerintah dan swasta memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Secara umum peranan pemerintah dalam pembangunan lebih cenderung sebagai ‘penggerak’ pembangunan. Hal ini terkait dengan dengan adanya alokasi dana pembangunan yang bersumber dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Berikut merupakan pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya dan PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Kubu Raya pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016.

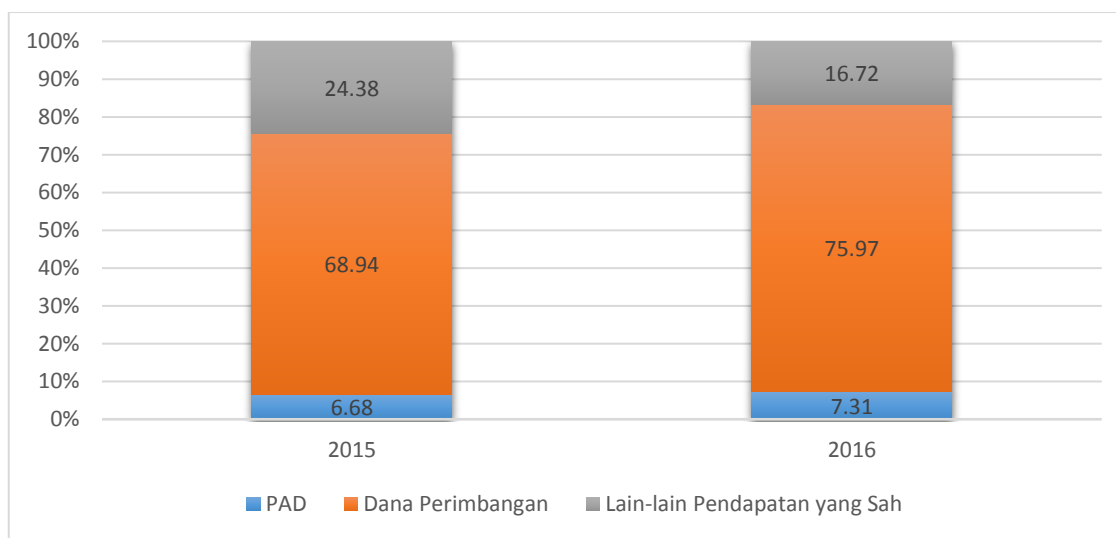
**Gambar 3.10. Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya dan PDRB ADHB Tahun 2012-2016 (Juta Rp)**



Berdasarkan Gambar 3.10 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah relatif lebih kecil daripada PDRB Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2012, pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp793,41 juta,

sedangkan PDRB Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp13,11 triliun. Sementara itu, pada tahun 2016, pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp1,39 triliun, sedangkan PDRB Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp21,14 triliun. Untuk lebih jelasnya, persentase pendapatan daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada Gambar 3.11 berikut.

**Gambar 3.11. Persentase Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 dan 2016**



Pada Gambar 3.11 dapat dilihat bahwa baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016, persentase terkecil pendapatan daerah di Kabupaten Kubu Raya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, pendapatan daerah terbesar bersumber dari dana perimbangan yang mencapai sebesar 75,97 persen pada tahun 2016. Untuk meningkatkan PAD, salah satu upaya pemerintah daerah yang terus-menerus dilakukan adalah menggali sumber-sumber potensi yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Berikut ini merupakan rincian realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

**Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya  
Tahun 2014-2016 (Juta Rp)**

Jenis Pendapatan		2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1	Pajak Daerah	65.632,13	54.285,08	67.629,09
1.2	Retribusi Daerah	25.180,13	6.003,74	6.645,57
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	563,74	1.724,72	2.117,38
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	6.031,49	24.456,21	24.953,86
2	Dana Perimbangan			
2.1	Bagi Hasil Pajak	25.962,18	20.923,47	24.306,78
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak	33.976,55	17.872,90	2.164,32
2.3	Dana Alokasi Umum	699.700,43	732.770,24	787.062,20
2.4	Dana Alokasi Khusus	82.076,28	120.386,15	239.532,02
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah			
3.1	Pendapatan Hibah	410,91	67.074,25	98.356,63
3.2	Dana Darurat	63,37	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten dan Pemerintah Daerah Lainnya	27.118,61	68.862,47	38.684,15
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	-	170.479,09	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Kabupaten atau Pemerintah Daerah Lainnya	30.474,00	8.974,00	12.478,80
3.6	Dana Desa	-	-	77.211,48
3.7	Pendapatan Lainnya	-	-	5.000,00
	Jumlah	1.092.289,82	1.293.812,32	1.386.142,28

Sumber: Kubu Raya Dalam Angka 2015-2017

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 hingga 2016 realisasi penerimaan PAD terbesar bersumber dari penerimaan pajak daerah. Secara lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pajak dapat dilihat melalui Tabel 3.5. Penerimaan pajak daerah terbesar di Kabupaten Kubu Raya adalah pada jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang mencapai sebesar Rp29,32 milyar atau sekitar 53,5 persen dari total penerimaan pajak daerah. Sementara penerimaan pajak pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet merupakan yang terkecil, yaitu hanya sebesar Rp24,54 juta. Nilai ini tidak mencapai satu persen dari total penerimaan pajak daerah.

**Tabel 3.5. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 (Ribu Rp)**

No	Jenis Pajak	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pajak Hotel	571.364,54	461.708,30	597.627,98
2	Pajak Restoran	1.394.306,21	1.629.002,51	2.631.342,69
3	Pajak Hiburan	214.004,94	266.228,09	362.563,67
4	Reklame	1.031.353,30	1.112.051,71	954.993,72
5	Pajak Penerangan Jalan	14.198.524,35	17.111.379,45	18.881.326,05
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	3.189.412,88	3.540.500,98	2.549.611,20
7	Pajak Parkir	634.973,70	1.596.438,90	2.004.356,85
8	Pajak Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet	6.700,00	19.000,00	24.540,00
9	Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	36.404.911,78	22.185.593,37	29.321.170,60
10	Pajak Bumi dan Bangunan	7.084.047,74	6.917.391,40	10.301.551,81
<b>Jumlah</b>		<b>64.729.599,44</b>	<b>64.729.599,44</b>	<b>54.839.294,71</b>

Sumber: Kubu Raya Dalam Angka 2015-2017

### 3.3.2. Pengeluaran Daerah

Berikut ini merupakan realisasi pengeluaran daerah menurut jenisnya di Kabupaten Kubu Raya tahun 2014-2016.

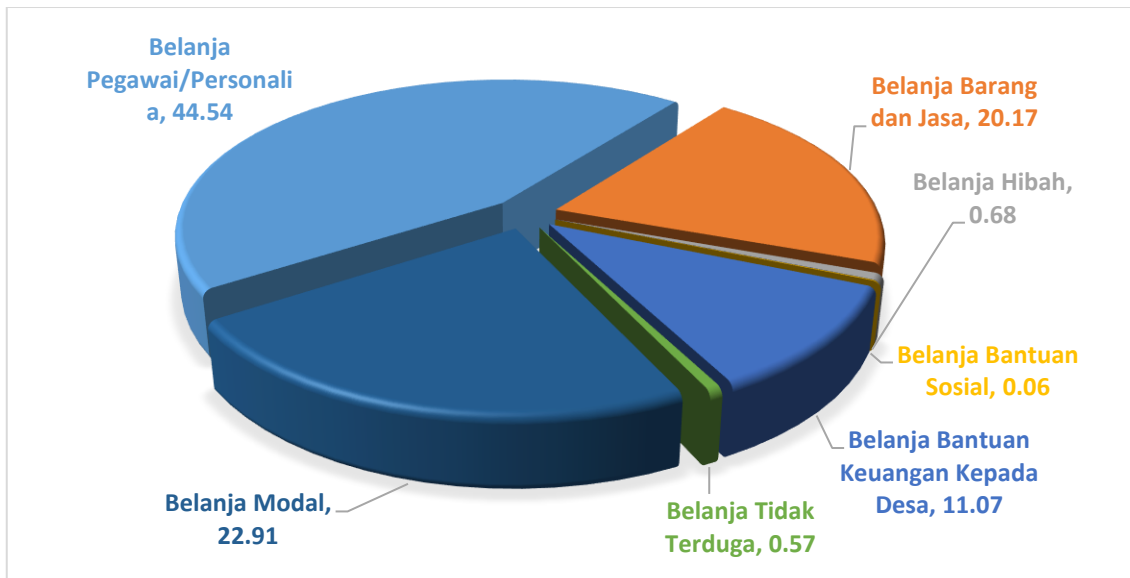
**Tabel 3.6. Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014-2016 (Juta Rp)**

Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Pegawai/Personalia	508.677,40	572.179,34	584.796,50
Belanja Barang dan Jasa	180.298,58	334.208,42	264.791,49
Belanja Hibah	4.766,08	4.668,00	8.919,44
Belanja Bantuan Sosial	2.961,53	359,83	825,19
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	24.688,81	-	145.328,89
Belanja Tidak Terduga	227,54	-	7.543,62
Belanja Modal	310.263,26	213.815,81	300.847,70
	<b>1.031.883,20</b>	<b>1.125.231,40</b>	<b>1.313.052,83</b>

Sumber: Kubu Raya Dalam Angka 2015-2017

Selama tiga tahun terakhir, pengeluaran daerah terbesar digunakan untuk belanja pegawai/personalia yang mencapai Rp584,79 miliar pada tahun 2016. Sementara belanja modal merupakan pengeluaran terbesar kedua yaitu sebesar Rp300,85 miliar. Berikut ini merupakan persentase realisasi pengeluaran daerah menurut jenisnya di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016.

**Gambar 3.12. Persentase Realisasi Pengeluaran Daerah Menurut Jenisnya di Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016**



Berdasarkan Gambar 3.12, dapat dilihat bahwa persentase realisasi pengeluaran daerah terbesar di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 terdapat pada belanja pegawai/personalia yaitu sebesar 44,54 persen. Kemudian, persentase realisasi pengeluaran daerah terbesar kedua terdapat pada belanja modal yaitu sebesar 22,91 persen. Sementara itu, persentase realisasi pengeluaran daerah di Kabupaten Kubu Raya terdapat pada belanja bantuan sosial yaitu sebesar 0,06 persen.

# **BAB 4**

**KONDISI PEREKONOMIAN  
KABUPATEN/KOTA DI  
KALIMANTAN BARAT**





## Bab

## 4

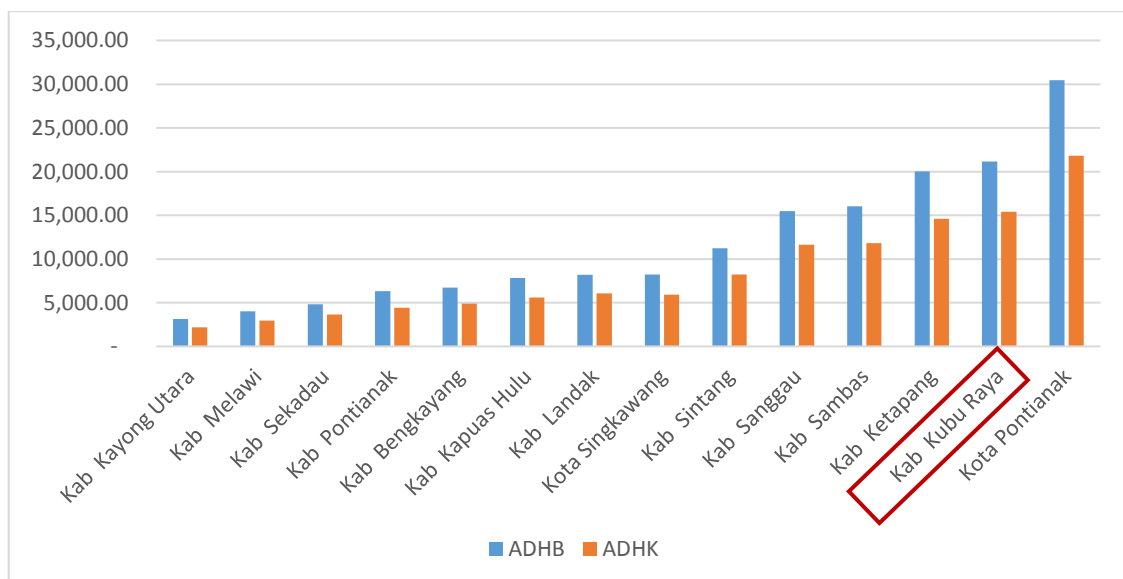
## KONDISI PEREKONOMIAN KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN BARAT

*Bab ini berisi tentang gambaran kondisi ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, kontribusi mereka terhadap provinsi, pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, PDRB per kapita, keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran*

### 4.1. Kontribusi Perekonomian Kabupaten/Kota terhadap Kalimantan Barat

Perekonomian Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari seluruh kondisi perekonomian yang terjadi di kabupaten/kota. Berikut ini merupakan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016.

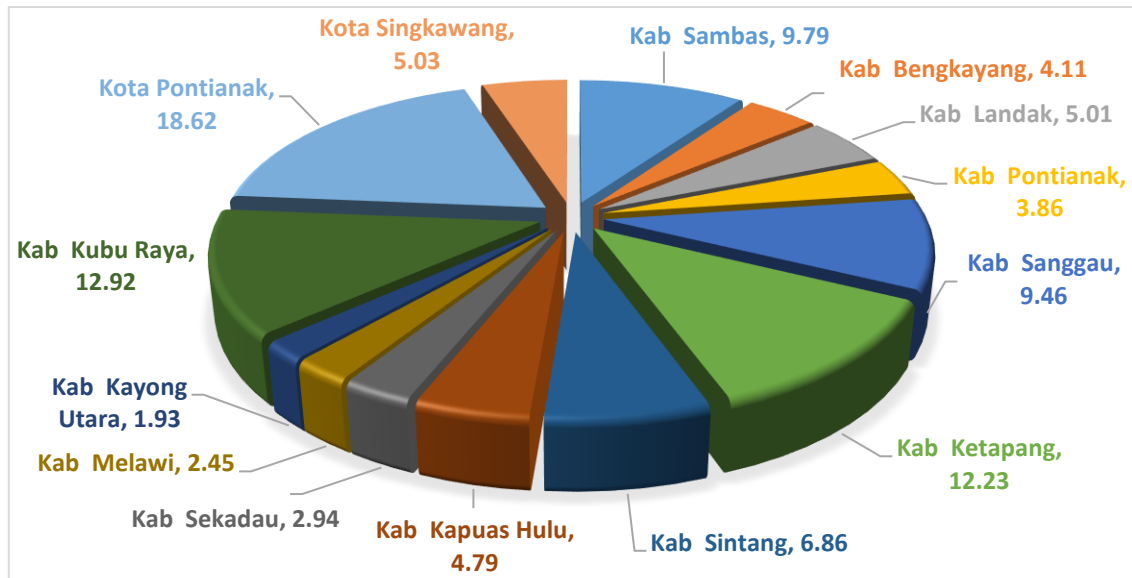
**Gambar 4.1. PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Milyar Rp)**



Pada tahun 2016, kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki nilai PDRB paling besar adalah Kota Pontianak, yaitu mencapai Rp30,48 triliun.

Sementara itu, nilai PDRB Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp21,14 triliun, selisih sebesar Rp9,34 triliun dengan Kota Pontianak. Kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki PDRB paling kecil adalah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp3,15 triliun. Besar kontribusi masing-masing kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat secara lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut.

**Gambar 4.2. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2016 (Persen)**



Untuk melihat kontribusi masing-masing kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat, digunakan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016. Berdasarkan Gambar 4.2, kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat berasal dari Kota Pontianak sebesar 18,63 persen. Kemudian, kontribusi terbesar kedua berasal dari Kabupaten Kubu Raya sebesar 12,92 persen. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah yang merupakan daerah pemekaran, kontribusi Kabupaten Kubu Raya lebih besar dibandingkan dengan kontribusi Kabupaten Mempawah yang sebesar 3,86 persen. Sementara itu, kontribusi terkecil berasal dari Kabupaten Kayong Utara yaitu sebesar 1,93 persen dari total perekonomian Provinsi Kalimantan Barat.

#### 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sangat mempengaruhi *trend* pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2016, pertumbuhan ekonomi seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami *trend* positif. Sepuluh dari empat belas kabupaten/kota pertumbuhannya tercatat di atas pertumbuhan ekonomi provinsi yang sebesar 5,22 persen, sebaliknya terdapat enam kabupaten/kota berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi.

**Tabel 4.1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016 (Persen)**

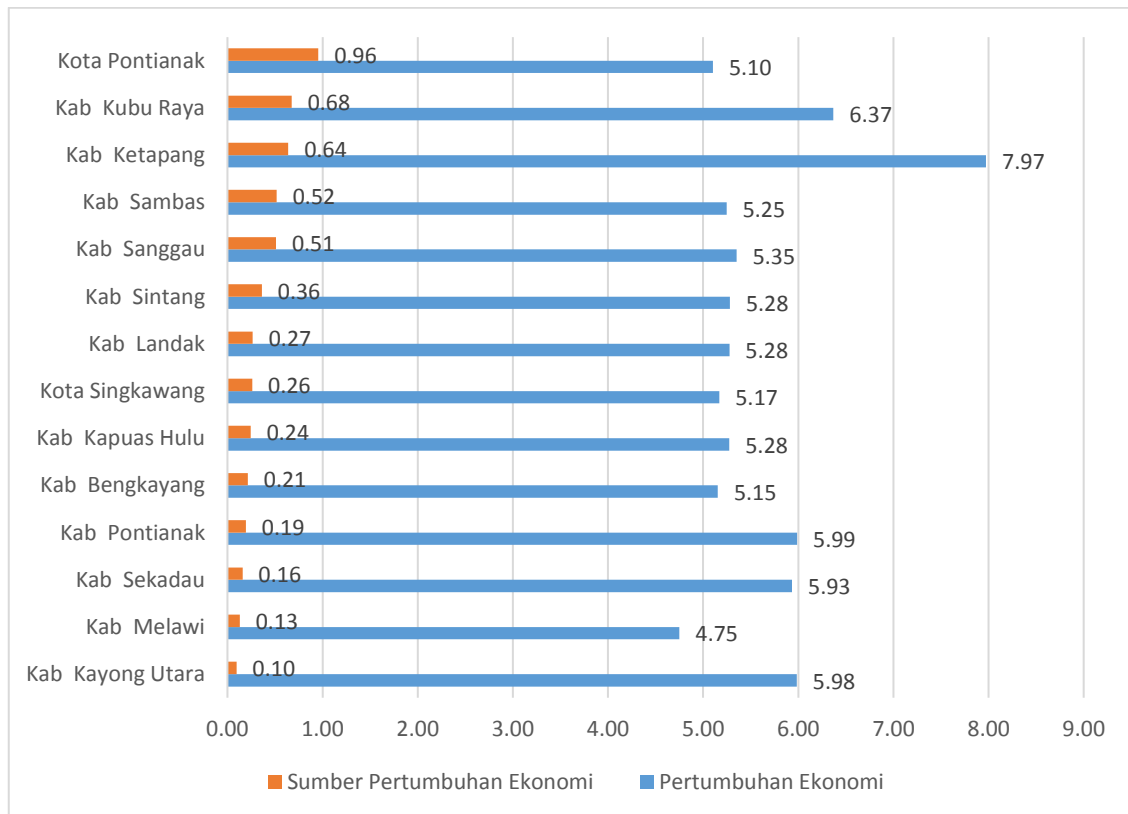
Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab Sambas	6.17	5.40	4.76	5.25
Kab Bengkayang	5.90	4.02	3.96	5.15
Kab Landak	5.20	4.93	5.11	5.28
Kab Pontianak	5.44	5.67	5.62	5.99
Kab Sanggau	5.98	3.26	3.68	5.35
Kab Ketapang	4.72	2.76	5.53	7.97
Kab Sintang	6.47	5.37	4.57	5.28
Kab Kapuas Hulu	5.23	3.98	4.66	5.28
Kab Sekadau	6.52	6.09	5.75	5.93
Kab Melawi	4.85	4.73	4.70	4.75
Kab Kayong Utara	5.25	5.66	5.03	5.98
<b>Kab Kubu Raya</b>	<b>6.49</b>	<b>6.28</b>	<b>6.36</b>	<b>6.37</b>
Kota Pontianak	7.83	5.54	4.99	5.10
Kota Singkawang	6.48	6.62	6.17	5.17
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>6.05</b>	<b>6.05</b>	<b>4.86</b>	<b>5.22</b>

Dilihat dari Tabel 4.1, terjadi fluktuasi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2014, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 6,05 persen. Namun, pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat melambat menjadi 4,86 persen. Kemudian, meningkat menjadi 5,22 persen pada tahun 2016.

Empat kabupaten/kota yang pertumbuhannya berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Melawi, Kota Pontianak,

Kabupaten Bengkayang, dan Kota Singkawang. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Ketapang sebesar 7,97 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya sebesar 6,37 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.

**Gambar 4.3. Sumber Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota Tahun 2016 (Persen)**



Pertumbuhan ekonomi suatu provinsi merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota didalamnya. Dengan demikian, perekonomian ekonomi Provinsi Kalimantan Barat juga tergantung pada pergerakan ekonomi pada 14 kabupaten/kota. Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Ketapang memberikan *share* paling besar terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat dan juga memberikan sumbangan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi provinsi. Pada tahun 2016 Kota Pontianak memberikan sumbangan sebesar 0,96 persen, Kabupaten Kubu Raya 0,68 persen, dan Kabupaten Ketapang sebesar 0,64 persen bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten lain yang juga memberikan sumbangan relatif besar adalah Kabupaten Sambas (0,52%) dan Kabupaten Sanggau (0,51%). Dengan demikian, kabupaten/kota yang memiliki kontribusi besar bagi

perekonomian Kalimantan Barat juga memberikan sumber pertumbuhan yang relatif besar.

#### 4.3. Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota

Berikut merupakan tiga kategori ekonomi yang memberi kontribusi tertinggi terhadap perekonomian di masing-masing kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016.

**Tabel 4.2. Tiga Kategori Ekonomi yang Memberi Kontribusi Tertinggi pada Perekonomian Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2016**

Kabupaten/Kota (1)	Tiga Kategori Dominan (2)
Kab Sambas	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (32,69%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17,33%), Industri Pengolahan (12,38%)
Kab Bengkayang	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (31,61%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,24%), Konstruksi (11,07%)
Kab Landak	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (35,13%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,88%), Industri Pengolahan (11,74%)
Kab Pontianak	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (25,99%), Industri Pengolahan (15,66%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (15,50%)
Kab Sanggau	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (30,75%), Industri Pengolahan (19,52%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (12,07%)
Kab Ketapang	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (25,22%), Pertambangan dan Penggalan (17,62%), Industri Pengolahan (13,64%)
Kab Sintang	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (23,46%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (17,69%), Konstruksi (13,88%)
Kab Kapuas Hulu	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (19,62%), Konstruksi (16,75%), Industri Pengolahan (13,87%)

Kabupaten/Kota (1)	Tiga Kategori Dominan (2)
Kab Sekadau	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (38,11%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,49%), Konstruksi (11,72%)
Kab Melawi	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (20,72%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,24%), Konstruksi (12,78%)
Kab Kayong Utara	Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,77%), Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,15%), Konstruksi (11,31%)
Kab Kubu Raya	Industri Pengolahan (31,82%), Petanian, Kehutanan, dan Perikanan (12,72%), Konstruksi (12,06%)
Kota Pontianak	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (18,61%), Industri Pengolahan (16,56%), Konstruksi (16,40%)
Kota Singkawang	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (19,62%), Konstruksi (16,75%), Industri Pengolahan (13,87%)

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat bahwa kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada 10 dari 14 kabupaten/kota. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kategori dengan penyumbang terbesar bagi PDRB di masing-masing kabupaten berikut yaitu Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Melawi.

Di sisi lain, Kabupaten Kubu Raya merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang PDRB-nya ditopang oleh kategori industri pengolahan. Kategori industri pengolahan memberi kontribusi tertinggi pada perekonomian Kabupaten Kubu Raya sebesar 31,82 persen, disusul oleh kategori pertanian sebesar 12,72 persen, dan kategori konstruksi sebesar 12,06 persen.

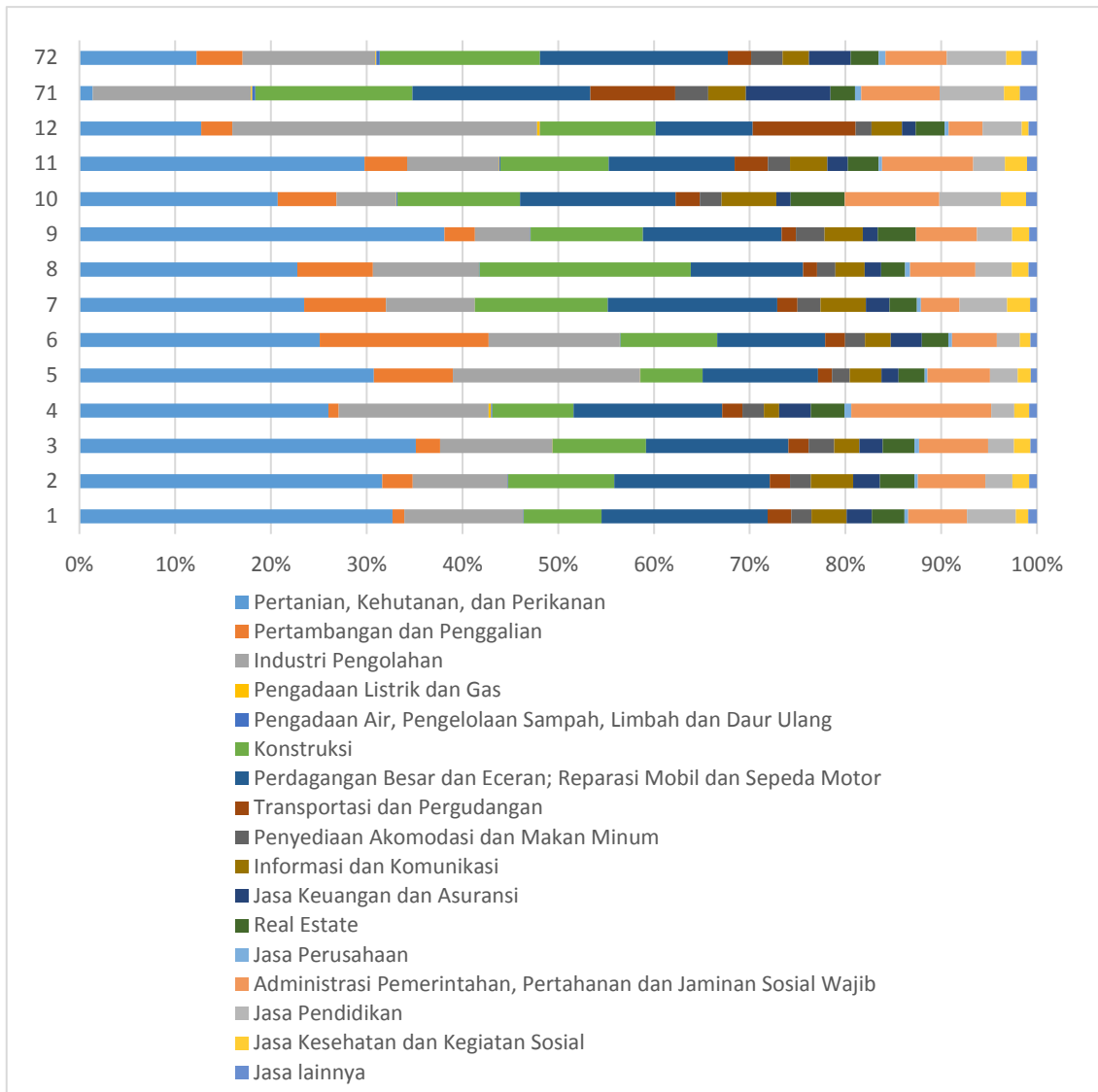
Sementara itu, perekonomian Kota Singkawang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak sebagian besar disumbang oleh kategori perdagangan besar dan eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor. Pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menyumbang PDRB masing-masing kabupaten/kota berturut-turut sebesar 19,62 persen, 19,62 persen dan 18,61 persen.

Berdasarkan Tabel 4.2 juga dapat dilihat bahwa pada sebagian besar kabupaten/kota yang kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi, kategori kedua yang menjadi kontributor cukup besar adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Terdapat tujuh kabupaten dimana kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memberi kontribusi terbesar kedua dibawah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kayong Utara.

Sementara itu, kategori industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak. Selanjutnya, kategori pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Ketapang dan kategori konstruksi menjadi penyumbang terbesar kedua pada PDRB Kabupaten Kapuas Hulu dan Kota Singkawang. Secara ilustrasi struktur perekonomian kabupaten/kota di Kalimantan Barat disajikan melalui Gambar 4.4 berikut

**Gambar 4.4. Struktur Perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Persen)**



#### 4.4. PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB per kapita didapatkan dari PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun tertentu. Data penduduk kabupaten/kota bersumber dari hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010. PDRB per kapita setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2012-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut.



**Tabel. 4.3. Nilai PDRB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012-2016 (Ribuan rupiah)**

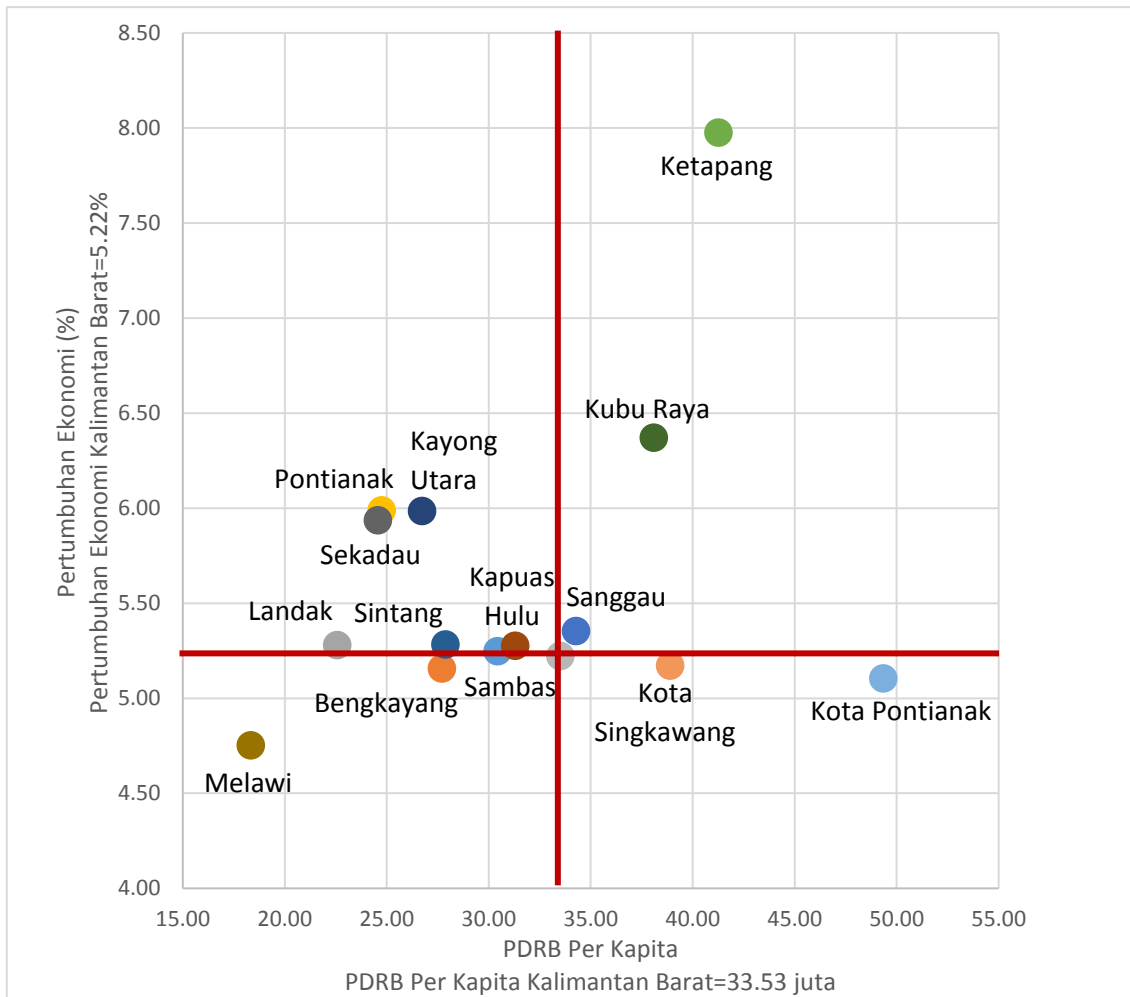
Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	20.804,68	22.924,31	25.420,42	27.981,48	30.453,78
Bengkayang	20.234,15	22.123,86	23.893,11	25.663,11	27.719,99
Landak	16.103,41	17.537,26	19.030,55	20.823,25	22.588,60
Pontianak	16.454,49	18.091,27	20.198,56	22.510,66	24.772,71
Sanggau	25.773,78	27.790,98	29.409,93	31.529,51	34.299,29
Ketapang	31.154,50	32.570,95	34.394,21	36.869,43	41.270,67
Sintang	19.697,54	21.830,95	23.783,99	25.775,02	27.893,29
Kapuas Hulu	22.413,73	24.582,18	26.537,12	28.696,89	31.319,45
Sekadau	16.860,18	18.511,04	20.395,68	22.436,04	24.579,30
Melawi	14.789,13	14.541,16	15.706,05	16.933,59	18.351,66
Kayong Utara	20.118,62	21.440,05	23.071,72	24.746,15	26.738,84
<b>Kubu Raya</b>	<b>25.178,18</b>	<b>27.763,14</b>	<b>30.928,98</b>	<b>34.653,13</b>	<b>38.109,93</b>
Kota Pontianak	33.564,58	38.063,34	41.915,75	45.950,15	49.363,75
Kota Singkawang	26.792,48	29.629,12	33.014,88	36.062,49	38.913,33
Kalimantan Barat	23.605,92	25.817,98	28.161,60	30.752,98	33.530,69

Sumber: Kubu Raya Dalam Angka, 2017

Berdasarkan Tabel 4.3, dapat dilihat bahwa terdapat gap (ketimpangan) yang relatif tinggi antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat. PDRB per kapita Kota Pontianak merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2012 hingga 2016. Tahun 2012, PDRB per kapita Kota Pontianak mencapai sekitar Rp33,56 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp49,36 juta, hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan PDRB per kapita Kabupaten Melawi yang besarnya Rp18,11 juta.

Sementara itu, PDRB per kapita terbesar setelah Kota Pontianak adalah Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya. Kabupaten Kubu Raya yang merupakan kontributor terbesar kedua pada perekonomian Provinsi Kalimantan Barat nilai PDRB per kapitanya lebih kecil dibandingkan dengan Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, dan Kota Singkawang. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Kabupaten Kubu Raya lebih kecil dari ketiga kabupaten/kota tersebut. Selain itu, nilai PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya terutama didukung oleh sebagian besar industri besar di Provinsi Kalimantan Barat berada di kabupaten ini. Pada Tabel 4.3 juga dapat dilihat bahwa PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Barat selalu meningkat setiap tahunnya pada tahun 2012 hingga tahun 2016.

**Gambar 4.5. Posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita Tahun 2016**



Secara umum, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan rata-rata di suatu daerah. Berdasarkan Gambar 4.5, pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang berada di atas nilai Provinsi Kalimantan Barat adalah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Sanggau. PDRB per kapita Kabupaten Kubu Raya yang cukup tinggi dapat disebabkan cukup tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016. Sementara itu, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Melawi nilai PDRB per kapita dan pertumbuhannya di bawah angka Provinsi Kalimantan Barat.

#### 4.5. Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan

Secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dan/atau melalui redistribusi pendapatan (Kakwani dan Son, 2003). Hal ini dilandasi pada teori *trickle-down effect* yang dikembangkan pertama kali oleh Arthur Lewis (1954) dan diperluas oleh Ranis dan Fei (1968). Teori tersebut menjadi salah satu topik penting di dalam literatur mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang (Least Develop Countries/LDCs) pada dekade 1950-an dan 1960-an.

Teori *trickle-down effect* menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang merata. Teori tersebut mengimplikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan diikuti oleh aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin yang terjadi dengan sendirinya. Manfaat pertumbuhan ekonomi akan dirasakan penduduk kaya terlebih dahulu, dan kemudian pada tahap selanjutnya penduduk miskin mulai memperoleh manfaat ketika penduduk kaya mulai membelanjakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang telah diterimanya.

Dengan demikian, maka pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan merupakan efek tidak langsung oleh adanya aliran vertikal dari penduduk kaya ke penduduk miskin. Hal ini berarti juga bahwa kemiskinan akan berkurang dalam skala yang sangat kecil bila penduduk miskin hanya menerima sedikit manfaat dari total manfaat yang ditimbulkan dari adanya pertumbuhan ekonomi.

Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi dengan persentase penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut

**Tabel 4.4. Pertumbuhan Ekonomi dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2016**

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
<b>Sambas</b>	8,54	5,25
<b>Bengkayang</b>	7,46	5,15
<b>Landak</b>	12,32	5,28
<b>Pontianak</b>	5,75	5,99
<b>Sanggau</b>	4,51	5,35
<b>Ketapang</b>	10,99	7,97
<b>Sintang</b>	10,07	5,28
<b>Kapuas Hulu</b>	9,82	5,28
<b>Sekadau</b>	6,14	5,93
<b>Melawi</b>	12,63	4,75
<b>Kayong Utara</b>	10,19	5,98
<b>Kubu Raya</b>	<b>5,04</b>	<b>6,37</b>
<b>Kota Pontianak</b>	5,55	5,10
<b>Kota Singkawang</b>	5,33	5,17
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>7,87</b>	<b>5,22</b>

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 terdapat pada Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 7,97 persen. Posisi pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dicapai oleh Kabupaten Kubu Raya yaitu sebesar 6,37 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada Kabupaten Melawi yaitu sebesar 4,75 persen. Dilihat dari persentase penduduk miskin di masing-masing kabupaten kota, persentase penduduk miskin terbesar terdapat pada Kabupaten Melawi yaitu sebesar 12,63 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin terkecil terdapat pada Kabupaten Sanggau yaitu sebesar 4,51 persen.

**Gambar 4.6. Posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Penduduk Miskin Tahun 2016**



Berdasarkan Gambar 4.6 dapat dilihat posisi kabupaten/kota di Kalimantan Barat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan besar persentase penduduk miskin yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Garis horizontal menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat dan garis vertikal menunjukkan besar persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya dua garis tersebut, terdapat empat kuadran yang membagi posisi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Terdapat beberapa kabupaten/kota yang pertumbuhannya di atas Provinsi Kalimantan Barat dan besar persentase penduduk miskinnya di bawah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau. Sementara itu, terdapat satu kabupaten/kota yang pertumbuhannya di bawah Provinsi Kalimantan Barat dan besar persentase penduduk miskinnya di atas Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Melawi.

#### 4.6. Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran memiliki hubungan yang erat karena penduduk yang bekerja berkontribusi dalam menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tidak memberikan kontribusi. Studi yang dilakukan oleh ekonom Arthur Okun mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan pengangguran, sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikut ini merupakan pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/kota di Kalimantan Barat pada tahun 2016.

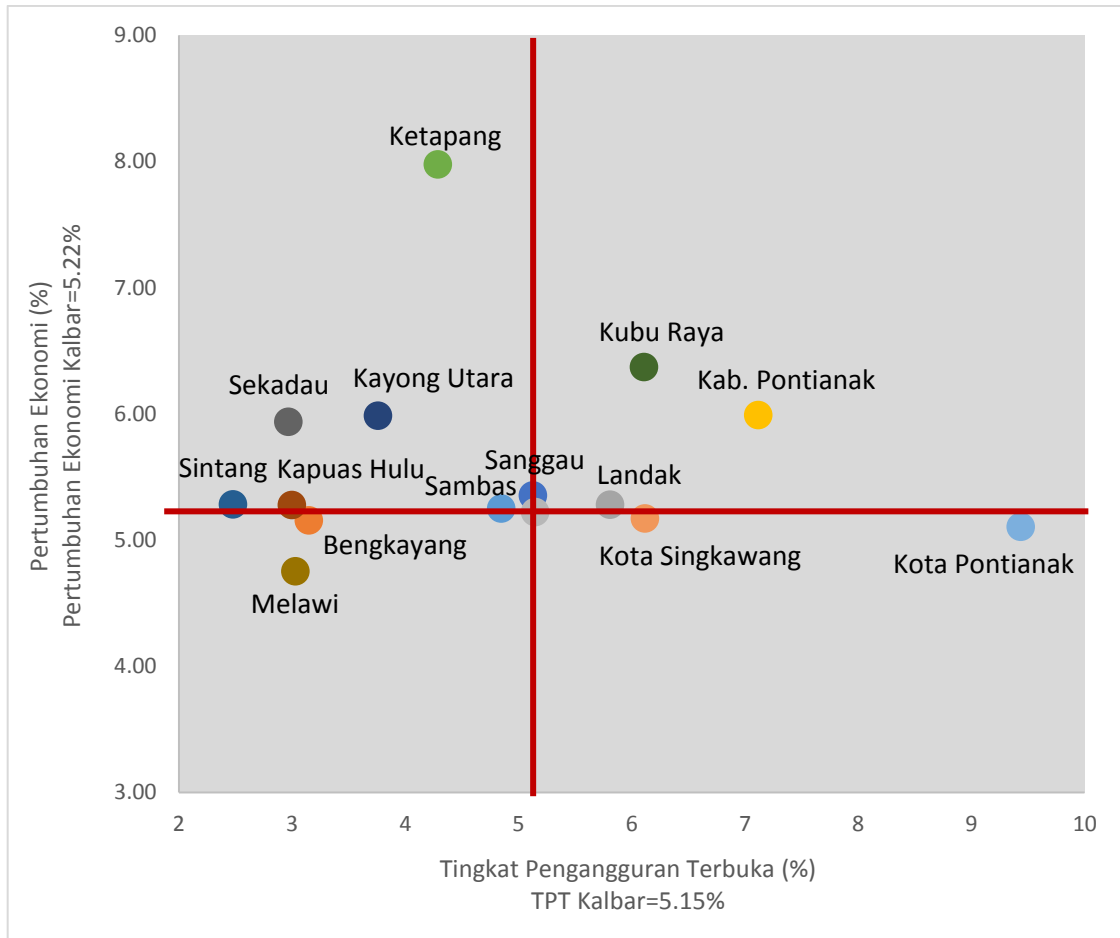
**Tabel 4.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2016**

Kabupaten/Kota (1)	TPT (%) (2)	Pertumbuhan Ekonomi (%) (3)
<b>Sambas</b>	4,85	5,25
<b>Bengkayang</b>	3,15	5,15
<b>Landak</b>	5,81	5,28
<b>Pontianak</b>	7,12	5,99
<b>Sanggau</b>	5,13	5,35
<b>Ketapang</b>	4,29	7,97
<b>Sintang</b>	2,48	5,28
<b>Kapuas Hulu</b>	3,00	5,28
<b>Sekadau</b>	2,97	5,93
<b>Melawi</b>	3,03	4,75
<b>Kayong Utara</b>	3,76	5,98
<b>Kubu Raya</b>	<b>6,11</b>	<b>6,37</b>
<b>Kota Pontianak</b>	9,44	5,10
<b>Kota Singkawang</b>	6,12	5,17
<b>Kalimantan Barat</b>	<b>5,15</b>	<b>5,22</b>

Sumber: Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka terbesar pada tahun 2016 terdapat pada Kota Pontianak. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka terkecil terdapat pada Kabupaten Sintang yaitu sebesar 2,48 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 terdapat pada Kabupaten Ketapang yaitu sebesar 7,97 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada Kabupaten Melawi yaitu sebesar 4,75 persen.

**Gambar 4.7. Posisi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Persentase Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2016**



Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat posisi kabupaten/kota di Kalimantan Barat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan besar persentase tingkat pengangguran terbuka yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Garis horizontal menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat dan garis vertikal menunjukkan besar persentase tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya dua garis tersebut, terdapat empat kuadran yang membagi posisi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Terdapat beberapa kabupaten/kota yang pertumbuhannya di atas Provinsi Kalimantan Barat dan besar persentase tingkat pengangguran terbukanya di bawah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Sekadau. Sementara itu, terdapat satu kabupaten/kota yang pertumbuhannya di bawah Provinsi Kalimantan Barat dan besar persentase tingkat pengangguran terbukanya di atas Provinsi Kalimantan Barat

yaitu Kota Pontianak. Sementara itu, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Melawi merupakan kabupaten dengan tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi di bawah angka Kalimantan Barat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kubu Raya di atas angka Kalimantan Barat, namun tingkat pengangguran terbukanya masih lebih besar dari Provinsi Kalimantan Barat.



# **BAB 5**

**DAYA DUKUNG  
PENGEMBANGAN  
EKONOMIMAKRO**



# Bab 5

## DAYA DUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI MAKRO

*Bab ini berisi tentang kebutuhan investasi dan kategori yang berpotensi untuk terus dikembangkan di Kabupaten Kubu Raya*

### 5.1. Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai kemajuan dan perkembangan ekonomi Kabupaten Kubu Raya tahun 2012-2016 serta sejalan dengan permasalahan dan agenda pembangunan yang telah ditetapkan, maka upaya-upaya peningkatan investasi terus dilakukan. Guna mencapai tingkat efisiensi kegiatan ekonomi, keperluan investasi diukur dengan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR).

Secara matematis ICOR dinyatakan sebagai rasio antara penambahan investasi terhadap penambahan output, atau dinotasikan sebagai:

$$\text{ICOR} = \frac{\Delta K}{\Delta Y}$$

dengan,  $\Delta K$  = penambahan kapasitas (investasi), dan

$\Delta Y$  = penambahan output

Dalam praktek, data yang diperoleh bukan penambahan barang modal baru atau penambahan kapasitas terpasang, akan tetapi besarnya investasi (I) yang ditanamkan oleh pemerintah maupun swasta, sehingga  $\Delta K=I$ . Dengan demikian rumus di atas dapat dimodifikasi menjadi:

$$\text{ICOR} = \frac{I}{\Delta Y}$$

Menurut peneliti Hg. Suseno Triyanto Widodo (1990), berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan koefisien ICOR yang dianggap memiliki produktivitas

investasi yang baik adalah yang bernilai antara 3 hingga 4. Semakin tinggi koefisien ICOR maka semakin inefisien investasi yang ditanam.

Pada tahun 2016 nilai ICOR sebesar 5,86, yang berarti masih terjadi inefisiensi dalam penggunaan investasi. Nilai ICOR sebesar 5,86 berarti untuk setiap modal yang diinvestasikan sebesar 5,86 rupiah akan menghasilkan output 1 rupiah pada tahun 2016. Diharapkan nilai ICOR Kabupaten Kubu Raya semakin menurun mendekati angka 4 atau menjadi sebesar 5 pada tahun 2017. Dengan demikian, maka kenaikan 1 rupiah output pada tahun 2017 terjadi karena investasi senilai 5,00 rupiah.

Untuk meningkatkan nilai investasi, maka dapat memperbesar penarikan dana dari masyarakat. Dana-dana masyarakat tersebut selain diinvestasikan sendiri secara langsung juga disalurkan melalui perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi dan sebagainya.

Selain itu berbagai langkah perlu ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya untuk memperbesar sumber dana investasi, baik melalui peningkatan penerimaan pajak, optimalisasi sumber daya alam dengan mencegah pencurian dan pengrusakan berbagai sumber daya yang ada. Disamping itu optimalisasi dana yang terkait dengan keagamaan seperti wakaf, zakat, infak dan sebagainya akan terus diupayakan.

Seluruh dana yang dapat dihimpun, akan digunakan sebagai investasi pada berbagai sektor penting, terutama di daerah-daerah yang terisolir (*remote areas*) dan perbatasan (*border zone*). Tujuannya adalah untuk mengembalikan kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat kepada kondisi yang lebih baik. Selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam pembangunan antardaerah, menunjang kawasan-kawasan yang cepat tumbuh serta membuat kutub-kutub pertumbuhan baru. Dengan ini pertumbuhan ekonomi diharapkan akan berada pada tingkat yang memadai dan pelaksanaan pembangunan menjadi lebih adil dan merata, serta kesejahteraan hidup masyarakat dapat dicapai.

## 5.2. Sektor Potensi

Indeks *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu alat analisis yang dipergunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan atau diekspor. Secara teoritis, sektor yang memiliki nilai LQ lebih dari 1 (satu) merupakan sektor spesialisasi daerah yang diharapkan akan mampu dikembangkan lebih lanjut (sektor unggulan atau sektor potensi) dan untuk sektor-sektor tertentu

memiliki peluang untuk diekspor. Indeks ini diperoleh dari perbandingan kontribusi antara sektoral antara PDRB Kabupaten Kubu Raya atas dasar harga konstan 2010 dengan kontribusi sektoral PDRB Provinsi Kalimantan Barat pada tahun yang sama.

Hasil penghitungan indeks LQ menunjukkan kategori yang berpotensi dikembangkan atau spesialisasi pengembangan sektoral berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 5.1.

**Tabel 5.1. Kontribusi Kategori Ekonomi di Kabupaten Kubu Raya dan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 (Persen)**

No.	Kategori	Kubu Raya	Kalimantan Barat	LQ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,16	22,60	0,67
2	Pertambangan dan Penggalian	2,96	4,75	0,62
3	Industri Pengolahan	32,72	16,50	1,98
4	Pengadaan Listrik, Gas	0,30	0,10	2,89
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,14	0,29
6	Konstruksi	10,95	11,04	0,99
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,56	15,08	0,70
8	Transportasi dan Pergudangan	8,30	4,23	1,96
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,65	2,29	0,72
10	Informasi dan Komunikasi	4,31	4,58	0,94
11	Jasa Keuangan	1,54	3,76	0,41
12	Real Estate	2,77	2,90	0,95
13	Jasa Perusahaan	0,49	0,48	1,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,95	4,93	0,60
15	Jasa Pendidikan	3,57	4,13	0,86
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	1,41	0,54
17	Jasa Lainnya	0,98	1,06	0,93
	Total	100,00	100,00	

Sumber: BPS Kabupaten Kubu Raya, 2017

Kategori yang memiliki Indeks LQ lebih dari satu adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Industri Pengolahan, kategori Transportasi dan Pergudangan, serta kategori Jasa Perusahaan. Kategori ini merupakan kategori-kategori yang

berpeluang untuk dikembangkan dan juga dipasarkan ke luar daerah, terutama Kategori Pengadaan Listrik dan Gas dengan Indeks LQ yang paling tinggi 2,68.

Sementara ini, kategori yang memiliki nilai indeks mendekati 1 juga berpeluang untuk terus dikembangkan, yaitu kategori konstruksi, kategori real estate, kategori informasi dan komunikasi, dan kategori jasa lainnya.

Pengembangan di kategori industri pengolahan perlu dicermati, khususnya industri pengolahan kayu di Kabupaten Kubu Raya karena sangat tergantung dengan pasokan bahan baku berupa kayu log yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena semakin menipisnya persediaan hutan yang siap tebang berupa kayu log di Provinsi Kalimantan Barat. Kategori-kategori lain juga bisa dikembangkan seperti di kategori jasa perusahaan, kategori bangunan serta kategori transportasi dan pergudangan yang mempunyai Indeks LQ masing-masing sebesar 0,95; 0,95 dan 1,89. Kategori-kategori yang cukup prospektif lainnya adalah kategori bangunan, kategori informasi dan komunikasi, dan jasa lainnya dengan LQ masing-masing sebesar 0,94; 0,94; dan 0,92. Selama ini industri pengolahan di Kabupaten Kubu Raya ditopang paling besar oleh industri makanan dan minuman, khususnya industri pengolahan sawit.

Perlu diperhatikan bahwa dalam melihat nilai indeks LQ tidak berarti secara mutlak sektor tersebut hanya dapat dikembangkan di kabupaten/kota yang memiliki LQ lebih dari 1 (satu). Untuk melihat sektor basis atau sektor unggulan selain dari indeks LQ, disarankan perlu disertai dengan pendekatan menggunakan alat analisis lainnya.



**BAB 6**  
**PENUTUP**

## Bab

## 6

## PENUTUP

**Kesimpulan**

- Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya tahun 2016 sebesar 6,37 persen, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
- Pertumbuhan ekonomi terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan pada kategori *non-tradable*, khususnya kategori pengadaan listrik dan gas, kategori informasi dan komunikasi, serta kategori transportasi dan pergudangan.
- Kategori-kategori penggerak utama perekonomian yaitu kategori industri pengolahan, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta kategori konstruksi, dengan pertumbuhan yang relatif lebih kecil dibandingkan kategori lainnya.
- Selama sembilan tahun terakhir, terjadi pergeseran struktur perekonomian. Kategori ekonomi yang mengalami peningkatan kontribusi selama kurun waktu sembilan tahun terakhir yaitu kategori konstruksi, kategori pengangkutan dan komunikasi, serta kategori jasa-jasa. Sementara kategori ekonomi yang mengalami penurunan kontribusi yaitu kategori industri pengolahan, kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta kategori perdagangan, hotel dan restoran.
- Berdasarkan pendekatan penggunaan (*expenditure*), sebagian besar yaitu sekitar 53,48 persen perekonomian Kabupaten Kubu Raya disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Berdasarkan pertumbuhannya, pada tahun 2016 tertinggi pada pengeluaran konsumsi LNPRRT yang mencapai sebesar 9,91 persen.
- Pada tahun 2012 hingga tahun 2016, sebagian besar penduduk Kabupaten Kubu Raya bekerja pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada tahun 2016, terdapat 121.499 penduduk Kabupaten Kubu Raya yang bekerja pada kategori tersebut.

- Pada tahun 2016, tingkat pengangguran di Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar 6,42 persen, meningkat dari tahun sebelumnya. Tingkat Produktivitas Relatif (TPR) tertinggi terdapat pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu sebesar 2,91.
- Pada tahun 2016 koefisien ILOR Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar 1,26 yang berarti bahwa setiap penambahan 100 juta rupiah output maka akan menyerap sebesar 126 tenaga kerja pada tahun 2016.
- Pada tahun 2016, nilai PMDN Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp8,01 triliun, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara nilai investasi PMA di Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar Rp1,86 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
- Koefisien ICOR Kabupaten Kubu Raya adalah sebesar 5,86. Hal ini berarti, untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen maka diperlukan pertumbuhan investasi minimal sebesar 5,86 persen pada tahun 2016.
- Baik pada tahun 2015 maupun tahun 2016, persentase terkecil pendapatan daerah di Kabupaten Kubu Raya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan daerah terbesar bersumber dari dana perimbangan. Sementara itu, persentase realisasi pengeluaran daerah terbesar di Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2016 terdapat pada belanja pegawai/personalia yaitu sebesar 44,54 persen.
- Pada tahun 2016, kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki PDRB paling besar adalah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Sementara kabupaten/kota yang memiliki PDRB paling kecil adalah Kabupaten Kayong Utara.
- Pertumbuhan ekonomi tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Ketapang sebesar 7,97 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua dimiliki oleh Kabupaten Kubu Raya sebesar 6,37 persen.
- Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat yaitu pada 10 dari 14 kabupaten/kota.
- PDRB per kapita secara berturut-turut mulai dari yang terbesar adalah Kota Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, dan Kabupaten Kubu Raya.
- Kabupaten/kota yang pertumbuhannya di atas Provinsi Kalimantan Barat dan besar persentase penduduk miskinnya di bawah Provinsi Kalimantan Barat



yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sanggau.

- Kabupaten/kota yang pertumbuhan ekonominya diatas Provinsi Kalimantan Barat dan besar persentase tingkat pengangguran terbukanya dibawah Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sekadau
- Kategori yang berpeluang untuk dikembangkan dan juga dipasarkan ke luar daerah adalah kategori Pengadaan Listrik dan Gas, kategori Industri Pengolahan, kategori Transportasi dan Pergudangan, serta kategori Jasa Perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. (2017). *Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2017*. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu Raya
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2016*. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu Raya
- Badan Pusat Statistik. (2015). *Kabupaten Kubu Raya Dalam Angka 2015*. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu Raya
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu Raya
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kubu Raya Menurut Pengeluaran 2012-2016*. Kubu Raya: BPS Kabupaten Kubu Raya
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Statistik Ketenagakerjaan Kalimantan Barat Tahun 2016*. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat
- Kakwani, N dan Son, HH. (2003). *Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies*. *The Pakistan Development Review*, 42: 4 Part 1 pp 417-444
- Todaro, Michael P. (1999). *Economics Development in the Third World*. The Longman Inc New York.



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kubu Raya**

Kantor Bupati Kabupaten Kubu Raya  
Jalan Arteri Supadio Km 17,8 Sungai Raya 723443  
Phone (0561) 722744, Fax (0561) 723443